



Pemerintah Kabupaten Grobogan



**Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan
Tahun 2024**

**Pemerintah Kabupaten Grobogan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl Paramedis Komplek Simpang Lima Purwodadi Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan, Jawa Tengah 58011

**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA – SKPD)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

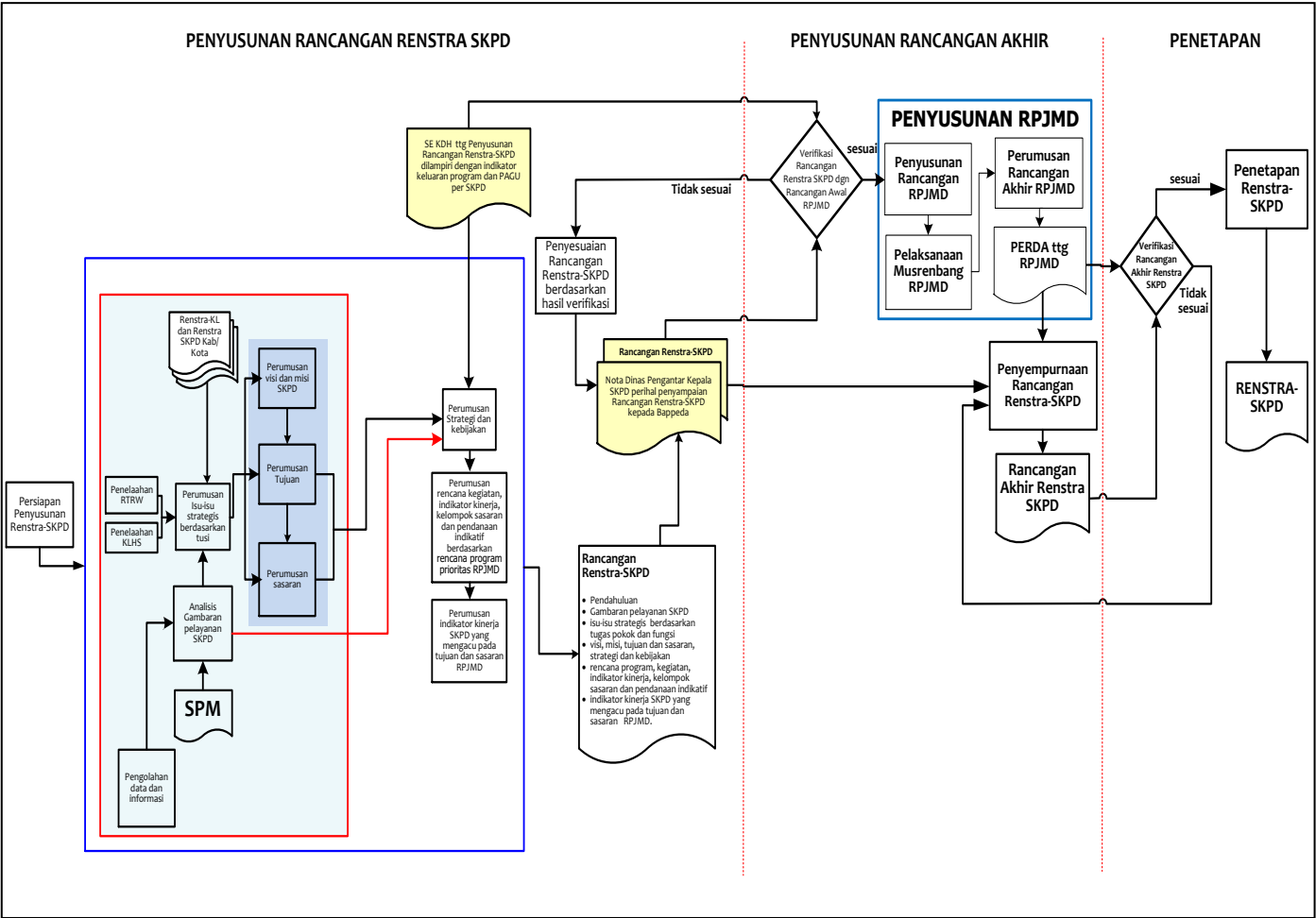
A. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara konsisten sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Grobogan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 menjadi pedoman bagi setiap Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan atau Rencana Kerja (Renja) PD.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup bertugas untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang lingkungan Hidup. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut untuk tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Grobogan menyusun rencana Kerja yang mengacu pada Renstra Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. RKPD memuat arah dan kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun.

Dokumen RKPD harus memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang berasal dari APBD atau APBN dan sumber - sumber lainnya yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 lebih diarahkan untuk mengatasi permasalahan/isu pencemaran lingkungan, Kerusakan Lingkungan dan pengelolaan persampahan. Untuk mengatasi isu pencemaran lingkungan ini, DLH Kabupaten Grobogan lebih memfokuskan untuk menurunkan beban pencemaran yang bersumber dari industri. Adapun untuk menangani isu kerusakan lingkungan lebih diarahkan untuk meningkatkan jumlah cadangan air yang dapat diresapkan untuk air bersih. Sedangkan dalam penanganan pengelolaan sampah ini lebih dioptimalkan untuk mencapai target Kabupaten Grobogan bersih dari sampah Tahun 2024.

Dalam penyusunan Renja DLH Kabupaten Grobogan mengacu pada tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah Tahapan penyusunan Renja dapat dilihat pada bagan alir tahapan penyusunan Renja PD Kabupaten sebagai berikut



B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2024 berlandaskan pada dasar hukum dan peraturan berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421).
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Kajian Lingkungan Hidup strategis serta pelaksanaan program Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
7. PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan menteri negara lingkungan hidup republik indonesia nomor 01 tahun 2012 tentang program menuju indonesia hijau
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021.
10. Peraturan Daerah (PERDA) no 12/2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2041
11. Perda No. 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025
12. RPJMD NO 8/2021 Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2024 ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

a. Maksud

1. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan dan Rencana Strategis DLH Kabupaten

Grobogan ke dalam rencana kerja yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun pada tahun 2024.

2. Menjadi pedoman bagi DLH Kabupaten Grobogan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 .

b. Tujuan

- a) Untuk mengarahkan seluruh kegiatan DLH Kabupaten Grobogan selama 1 (satu) tahun pada tahun 2024 sehingga sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra.
- b) Untuk dapat mengukur dan mengevaluasi kinerja DLH Kabupaten Grobogan selama 1 (satu) Tahun 2024

D. SISTEMATIKA

Sistematika penyusunan Renja Dinas Lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM,

maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan BerisiBerisikankan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal:

a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,

b. Pencapaian SDGs,

c. Pengentasan kemiskinan,

d. Pencapaian NSPK dan SPM,

e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,

f. Pengembangan daerah terisolir,

g. Dsb.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada Bab ini Berisikan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah

BAB V : PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2024

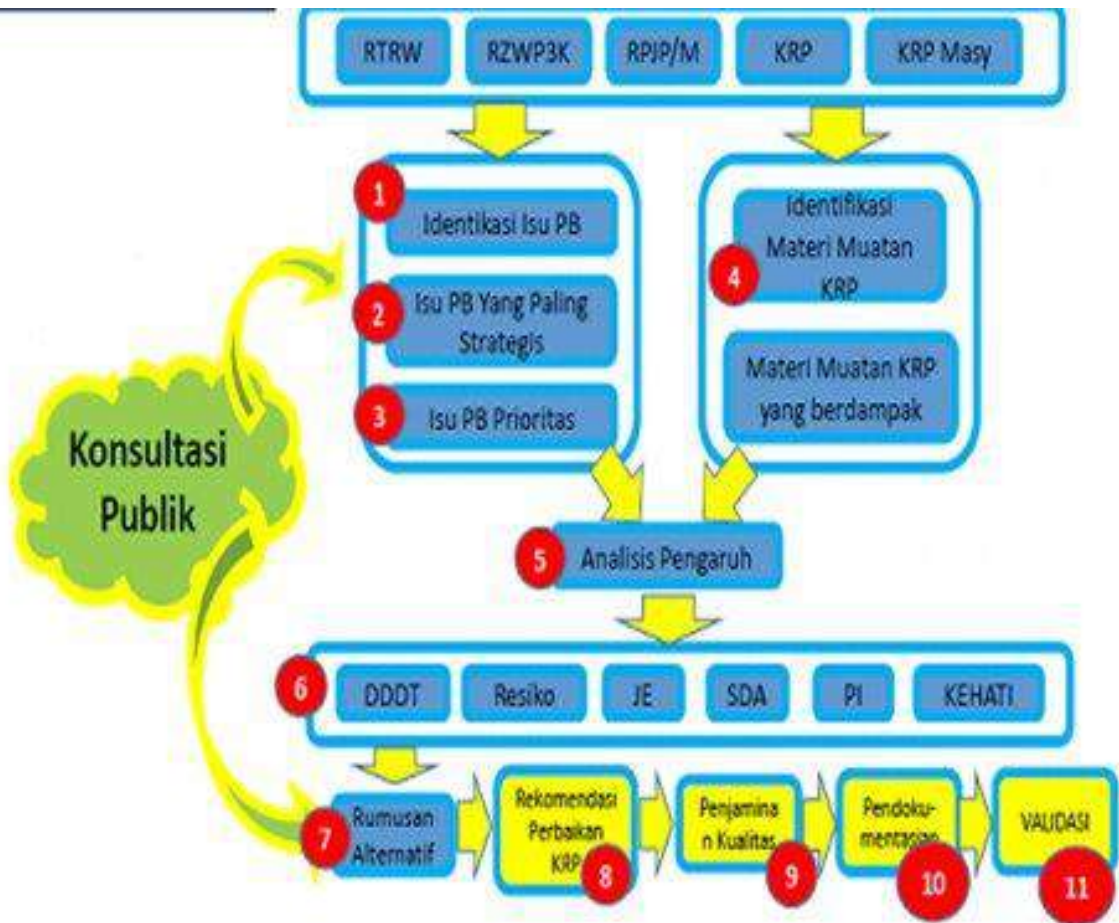
A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 58 Tahun 2016 tentang susunan pembentukan perangkat daerah kabupaten Grobogan maka Badan Pengendalian Lingkungan Hidup berkembang menjadi Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Grobogan dengan penambahan wewenang dalam hal pengelolaan persampahan. Dengan adanya penggabungan bidang kebersihan (bidang pengelolaan persampahan) diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam hal pengelolaan lingkungan dan persampahan. Dalam upaya meningkatkan kinerja DLH Kabupaten Grobogan pada tahun 2024, maka diperlukan evaluasi pelaksanaan renja pada tahun 2019 sehingga diharapkan renja pada tahun 2024 akan lebih efektif dan efisien.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu instrument pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Walaupun UU PPLH telah disahkan sejak tahun 2009, akan tetapi penyusunan KLHS baru mulai di intensifkan secara nasional pada tahun 2016 yaitu sejak keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Terkait penyusunan KLHS, Kabupaten Grobogan baru aktif melakukan penyusunan KLHS sejak tahun 2017 yang dilakukan terhadap 2 Kebijakan-Rencana-Progam (KRP) strategis yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031 perubahan RTRW 2021-2041; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026. Namun demikian, didalam praktek penyusunan KLHS untuk kedua KRP tersebut terdapat beberapa kendala yang timbul terutama dalam hal kualitas hasil penyusunan KLHS. Oleh karena itu, tulisan ini dibuat untuk mengkaji permasalahan-permasalahan menyangkut penyusunan KLHS sebagai upaya perbaikan penyusunan KLHS pada masa mendatang di Kabupaten Grobogan.



Bagan/Alur penyusunan KLHS

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026 lingkungan hidup merupakan salah satu fokus utama yang dikedepankan karena dalam pelaksanaannya akan memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) hal ini yang menjadi tujuan dari Dinas lingkungan hidup kabupaten Grobogan dalam memenuhi target-target sesuai turunan dari RPJMD 2021-2026 yaitu Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kinerja pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) sesuai ketentuan dan Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan pulik yang berkualitas serta memiliki sasaran rencana kerja yaitu Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah, Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta pengawasan dan pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) sesuai ketentuan, dan Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam mencapai Tujuan dan sasaran Renja yang telah ditetapkan maka Dinas Lingkungan Hidup memiliki 10 program serta kegiatan-kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan antara lain

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
I	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	a.Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
			b.Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
		2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	a Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
			b Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
			c Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
II	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	a koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air Udara dan laut
			b Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
			c Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup
		2.Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	aPemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
		3.Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	a Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemaran
			b Koordinasi, Sinkronikasi dan Pelaksanaan Rehabiltasi
III	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1.Membinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin	a.Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
			b.Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			c.Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH

IV	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1.Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	a.Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
			b. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
			c.Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
V	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1.Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	a.Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
VI	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	1.Penyelesaian Pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / kota	a.Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
			b.Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan
VII	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	a.Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
			b.Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
			c.Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
VIII	Program Pengelolaan Persampahan	1.Pengelolaan Sampah	a. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
			b. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauren Ulang dan Pemanfaatan Kembali
			c. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/Kota
			d.Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

			e. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
			f. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
IX	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	1. Penyimpanan Sementara Limbah B3	a.Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
X	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
			d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
			e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
			f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	a.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			b.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			c.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		3.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	a.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
			b.Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			c.Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		4.Administrasi Umum Perangkat Daerah	a.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

			b.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			c.Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			d.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			e.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			f. Penyediaan Bahan/Material
			g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			h.Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		5.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	a.Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			b.Pengadaan Mebel
			c.Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			d.Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		6.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a.Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			b.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			c.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		7.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			b.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			c.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program-progam tersebut akan dilakukan evaluasi setiap triwulan untuk mengetahui performa serta sudah sampai sejauh mana perolehan target sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diharapkan program-program ini memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi OPD yang selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Berikut adalah tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DLH DAN PENCAPAIAN RENSTRA DLH S/D TAHUN 2024 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GROBOGAN

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ OUTPUT KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISA SI TARGET KINERJA HASIL PROGRA M DAN KELUARA N KEGIATA N S/D DENGAN TAHUN (N-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU N-2			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAHTAH UN N-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGK AT DAERAH TAHUN (N- 2)	REALISAS I RENJA PERANGK AT DAERAH TAHUN (N- 2)	TINGKAT REALISA SI (%)		REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN S/DTAHUN BERJALAN (TAHUN N- 1)	TINGKAT CAPAIA N REALISA SI TARGET RENSTR A (%)
1	2	4	5	6	7	8		9	10	11
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	85,71	28,571428 57	71,428571	71,428571	100%	85,71	85,71	100%

2.11.02.2.01	2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang ditetapkan dan dievaluasi	100	50	100	100	100%	100	100	100%
2.11.02.2.01	2.11.02.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH yang disusun dan ditetapkan	1	1	1	1	100%	2	2	100%
2.11.02.2.01	2.11.02.2.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen pengendalian pelaksanaan pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota yang tersusun	1	1	0	0	100%	1	1	100%
2.11.02.2.02	2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota yang tersusun	100	0	0	0	100%	100	100	100%
2.11.02.2.02	2.11.02.2.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Dokumen KLHS RTRW yang tersusun	1	1	0	0	100%	1	1	100%

2.11.02.2.02	2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Dokumen KLHS RPJMD/ RPJPD yang tersusun	2	1	0	0	100%	0	0	100%
2.11.02.2.02	2.11.02.2.02.03 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Dokumen KLHS KRP yang Berpotensi menimbulkan dampak/ resiko lingkungan hidup yang tersusun	0	1	0	0	100%	0	0	100%
	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pemantauan kualitas air	100	57,14285714	71,428571	71,428571	100%	86	86	100%
		Cakupan pemantauan kualitas udara	100	75	100	100	100%	100	100	100%
2.11.03.2.01	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Presentase kampung iklim yang terbentuk	90	5	30	30	100%	60	60	100%
2.11.03.2.01	2.11.03.2.01.01 koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air Udara dan laut	Koordinasi dan sinkronisasi adipura yang dilaksanakan	5	5	5	5	100%	5	5	100%
		Jumlah peserta lomba LBS	19	19	19	19	100%	19	19	100%

		Pembangunan IPAL tahu dan tempe	0	0	1	1	100%	0	0	100%
		Pengadaan Onlimo	1	0	1	1	100%	1	1	100%
2.11.03.2.01	2.11.03.2.01.02	Kampung iklim yang terbentuk dan dibina	6	1	5	5	100%	6	6	100%
		Dokumen inventarisasi Gas Rumah Kaca yang tersusun	0	0	0	0	100%	1	1	100%
2.11.03.2.01	2.11.03.2.01.03	Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup	1	0	3	3	100%	1	1	100%
2.11.03.2.02	2.11.03.2.02	Jumlah Dokumen Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang tersusun	2	2	2	2	100%	2	2	100%
2.11.03.2.02	2.11.03.2.02.01	1. Dokumen IKPLHD yang disusun tiap tahun	1	1	1	1	100%	1	1	100%

	Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	2. Dokumen IKLH yang disusun tiap tahun	1	1	1	1	100%	1	1	100%
		3. Jumlah lokasi pengujian air dan udara ambien	45	30	36	36	100%	42	42	100%
2.11.03.2.03	2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	1	1	1	1	100%	1	1	100%
2.11.03.2.03	2.11.03.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemaran	Aksi Program Prokasih yang dilaksanakan	2	0	0	0	100%	2	2	100%
2.11.03.2.03	2.11.03.2.03.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabiltasi	1. Kelompok yang menerima bantuan bibit	5	2	1	1	100%	5	5	100%
		2. Pengadaan pupuk dan bibit tanaman hias	0	0	500	500	100%	0	0	100%
		3. Rehabilitasi lahan dengan cara sipil teknis (sumur resapan, gully plug dan dam penahan) yang terbangun	200	0	0	0	100%	150	150	100%

		4. Dam penahan yang terbangun	2	0	0	0	100%	2	2	100%
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	75,00	62,5	75	75	100%	75,00	75,00	100%
2.11.06.2.01	2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin	Jumlah data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/ kota	100	60	220	220	100%	100	100	100%
2.11.06.2.01	2.11.06.2.01.01 Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Usaha dan/atau Kegiatan yang difasilitasi pemenuhan persetujuan lingkungan	50	NA	220	220	100%	50	50	100%

		Usaha dan/atau Kegiatan yang difasilitasi pemenuhan persetujuan lingkungan	0	1	0	0	100%	0	0	100%
2.11.06.2.01	2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50	60	0	0	100%	50	50	100%
2.11.06.2.01	2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	10	0	0	0	100%	10	10	100%
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase pembentukan kader lingkungan tingkat desa/ kelurahan yang terbentuk	45	0	30	30	100%	40	40	100%

		Persentase sekolah yang sudah melaksanakan PBLHS (Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah tingkat kabupaten	25	0	15	15	100%	20	20	100%
2.11.08.2.01	2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan pembinaan Lingkungan Hidup	#VALUE!	6,896551724	17,241379	17,241379	100%	37,93	37,93	100%
			#DIV/0!	6,896551724	10,344828	10,344828	100%	20,69	20,69	100%
2.11.08.2.01	2.11.08.2.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber	Jumlah anggota saka kalpataru yang dibina	10	10	15	15	100%	10	10	100%

	Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya di bidang Lingkungan Hidup	10	0	0	0	100%	10	10	100%
2.11.08.2.01	2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Pelaksanaan gerakan peduli lingkungan hidup (Gerakan PBLHS) yang dilakukan	10	0	0	0	100%	10	10	100%
2.11.08.2.01	2.11.08.2.01.03 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	pelaksanaan car free day	47	0	0	0	100%	47	47	100%
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten terbaik	9	0	3	3	100%	9	9	100%

2.11.09.2.01	2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diberikan kepada Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan	3	0	1	1	100%	3	3	100%
2.11.09.2.01	2.11.09.2.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan penilaian kinerja Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	20	0	10	10	100%	15	15	100%

	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / kota yang terselesaikan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
2.11.10.2.01	2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / kota	Persentase pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / kota yang terselesaikan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
2.11.10.2.01	2.11.10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Layanan aduan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1	1	10	10	100%	1	1	100%

2.11.10.2.01	2.11.10.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	10	10	15	15	100%	10	10	100%
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Presentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	9,72	7,61	7,61	7,61	100%	8,45	8,45	100%
2.11.04.2.01	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Ruang Terbuka Hijau (RTH) terkelola dengan baik	23	18	18	18	100%	20	20	100%
2.11.04.2.01	2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terkelolanya Hutan Kota Purwodadi	1	1	1	1	100%	1	1	100%
2.11.04.2.01	2.11.04.2.01.05 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Terpeliharanya Taman Kota	22	17	17	17	100%	19	19	100%

2.11.04.2.
01

2.11.04.2.01.07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Sarana dan Prasarana Taman Kota yang ditingkatkan dan ditata	2	3	3	3	100%	2	2	100%
		0	0	0	0	100%	1	1	100%
		0	0	0	0	100%	0	0	100%
		1	0	0	0	100%	0	0	100%
		0	0	0	0	100%	0	0	100%
		0	0,00	0,00	0,00	100%	1	1	100%
	Persentase timbukan sampah yang tertangani	22,20	19,20	20,20	20,20	100%	21,20	21,20	100%
	Persentase usaha/ kegiatan yang menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang tertangani sesuai ketentuan	50	5	15	15	100%	30	30	100%
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah diperkotaan yang ditangani	73	67	69	69	100%	71	71	100%

2.11.11.2.01	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Volume pengurangan sampah	192	120	144	144	100%	168	168	100%
2.11.11.2.01	2.11.11.2.01.01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	1. Dokumen kebijakan dan strategi daerah (jakstrada) persampahan yang tersusun	0	0	0	0	100%	1	1	100%
		2. Dokumen naskah akademik dan review Perda Persampahan yang tersusun	1	0	0	0	100%	0	0	100%
		3. Dokumen FS/ DED TPA Sampah yang tersusun	0	0	0	0	100%	1	1	100%
		4. Perbup pengelolaan sampah yang tersusun	0	0	0	0	100%	1	1	100%
2.11.11.2.01	2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	KSM/ Bank Sampah yang terbantu dan terbina	6	12	12	12	100%	12	12	100%

		Pengadaan peralatan operasional KSM/ Bank Sampah	5	15	15	15	100%	10	10	100%
2.11.11.2.01	2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/Kota	1. Volume ampah yang tertangani di TPA	80	70	75	75	100%	80	80	100%
		2. Kegiatan patroli dan evakuasi sampah liar yang dilaksanakan	72	72	50	50	100%	72	72	100%
2.11.11.2.01	2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	1. Kelompok masyarakat yang terbina	5	0	15	15	100%	15	15	100%
		2. Kelompok masyarakat yang memperoleh bantuan	5	0	15	15	100%	15	15	100%
2.11.11.2.01	2.11.11.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Rapat koordinasi prasarana dan sarana pengelolaan persampahan yang dilakukan		0	0	0	100%	3	3	100%

2.11.11.2.
01

2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Pengadaan bulldozer dan excavator	1	0	0	0	100%	0	0	100%
	Pengadaan incenerator dengan proses firolisis	0	0	3	3	100%	1	1	100%
	Pengadaan Kontainer sampah	1	0	4	4	100%	1	1	100%
	Pengadaan tempat sampah	20	140	0	0	100%	20	20	100%
	Pengadaan mesin pencacah sampah	0	0	0	0	100%	0	0	100%
	Pengadaan mesin pemilah sampah plastik	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Panjang pagar keliling TPA yang terbangun	100	0			100%	100	100	100%
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung operasional IPAL	-	0	1	1	100%			100%

		Panjang saluran TPA yang direhabilitasi	0	0	0	0	100%	100	100	100%
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	62,50	25	37,5	37,5	100%	50,00	50,00	100%
2.11.05.2.01	2.11.05.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelaku usaha/ dan atau kegiatan yang telah memenuhi rincian teknis pengelolaan limbah B3	125	50	75	75	100%	100	100	100%
2.11.05.2.01	2.11.05.2.01.02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Pelaku usaha dan/ atau kegiatan penghasil LB3 yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis TPS LB3	125	50	15	15	100%	100	100	100%
		Nilai SAKIP perangkat daerah	82	79	80	80	100%	81	81	100%
		Nilai IKM	77,70 (B)	NA	76,79 (B)	76,79 (B)	100%	77,20 (B)	77,20 (B)	100%

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Laporan keuangan sesuai Standart Akuntansi Publik	100	NA	100	100	100%	100	100	100%
	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang kinerja urusan pemerintah daerah meliputi administrasi keuangan, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang, pemeliharaan BMD	100	NA	100	100	100%	100	100	100%
	Persentase pemenuhan dokumen area penilaian manajemen resiko	100	NA	100	100	100%	100	100	100%
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	100	100	100	100	100%	100	100	100%

X.XX.01.2.
01

X.XX.01.2.01	X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	4	1	3	3	100%	3	3	100%
X.XX.01.2.01	X.XX.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA- SKPD yang tersusun	25	30	30	30	100%	25	25	100%
X.XX.01.2.01	X.XX.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA- SKPD yang tersusun					100%			100%
X.XX.01.2.01	X.XX.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen DPA- SKPD yang tersusun					100%			100%
X.XX.01.2.01	X.XX.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dokumen Perubahan DPA- SKPD yang tersusun	12	12	12	12	100%	12	12	100%
X.XX.01.2.01	X.XX.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LKJIP yang tersusun	1	1	1	1	100%	1	1	100%

X.XX.01.2. 02	X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100	100	100	100	100%	100	100	100%
X.XX.01.2. 02	X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	14	14	14	14	100%	14	14	100%
X.XX.01.2. 05	X.XX.01.2.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	5	5	5	100%	5	5	100%
X.XX.01.2. 07	X.XX.01.2.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD tersusun	24	24	24	24	100%	24	24	100%
X.XX.01.2. 05	X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	100	100	100	100	100%	100	100	100%

X.XX.01.2.05	X.XX.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40	0	0	0	100%	40	40	100%
X.XX.01.2.05	X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10	0	0	0	100%	10	10	100%
X.XX.01.2.05	X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30	0	60	60	100%	30	30	100%
X.XX.01.2.06	X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100%
X.XX.01.2.06	X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50	100	50	50	100%	50	50	100%

X.XX.01.2. 06	X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlatan dan perlengkapan kantor	20		0	0	100%	0	0	100%
		Pengadaan korden	0		0	0	100%	20	20	100%
		Pengadaan peralatan makan minum	0				100%	20	20	100%
X.XX.01.2. 06	X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tercukupinya kebutuhan makan dan minum untuk keperluan kantor	130	130	130	130	100%	130	130	100%
X.XX.01.2. 06	X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Karcis retribusi persampahan yang tercetak	250	150	250	250	100%	250	250	100%
		Spanduk yang tercetak	10	24	24	24	100%	10	10	100%
X.XX.01.2. 06	X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	3	3	3	3	100%	3	3	100%
X.XX.01.2. 06	X.XX.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	7.000	1500	7000	7000	100%	7.000	7.000	100%
X.XX.01.2. 06	X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah	350	300	330	330	100%	350	350	100%

X.XX.01.2.06	X.XX.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang dikelola	25	20	20	20	100%	25	25	100%
X.XX.01.2.07	X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100	100	100	100	100%	100	100	100%
X.XX.01.2.07	X.XX.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan sampah roda 3	5	9	5	5	100%	5	5	100%
		Jumlah pengadaan dump truk	1	1	1	1	100%	0	0	100%
		Jumlah pengadaan amroll	0	0	0	0	100%	0	0	100%
X.XX.01.2.07	X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	5	0	0	0	100%			100%
X.XX.01.2.07	X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	2	15	0	0	100%	2	2	100%
		Pengadaan AC	1	0	0	0	100%	1	1	100%
		Pengadaan Laptop	1	3	0	0	100%			100%

		Pengadaan PC	1	1	0	0	100%			100%
		Pengadaan CCTV	1	4	0	0	100%	1	1	100%
		Pengadaan printer	2	2	0	0	100%	2	2	100%
X.XX.01.2.07	X.XX.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan gedung kantor atau bangunan lainnya	0	0	0	0	100%	0	0	100%
X.XX.01.2.08	X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100%
X.XX.01.2.08	X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemenuhan kebutuhan surat menyurat	12	12	12	12	100%	12	12	100%
X.XX.01.2.08	X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	12	12	100%	12	12	100%
X.XX.01.2.08	X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemebuhan pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	12	12	100%	12	12	100%

X.XX.01.2.09	X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	100	100	100	100%	100	100	100%
X.XX.01.2.09	X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	12	12	12	100%	12	12	100%
X.XX.01.2.09	X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	10	50	0	12	100%	10	10	100%
X.XX.01.2.09	X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan bangunan lainnya terehabilitasi/terpelihara	2	5	5	2	100%	2	2	100%

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN

No	Indikator	SPM/St andar Nasiona l	IKK	Target Renstra DLH				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahu n (tahu n n- 2)	Tah un (tah un n-1)	Tah un (tah un n)	Tah un (tah un n+1)	Tah un (tah un n-2)	Tah un (tah un n-1)	Tahu n (tahu n n)	Tah un (tah un n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kualitas Air	55,4	1.Jumlah lokasi pemantauan kualitas air sungai dan danau secara manual 2.Jumlah lokasi stasiun pemantau kualitas air sungai yang beroperasi secara kontinyu (ONLIMO), 3.Jumlah usahadan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah 4.Jumlah Fasilitas pengolahan air limbah di sungai 5.Jumlah fasilitas pengendalian pencemaran air	79,4 5	80,1	80,1	80, 1	79, 45	80,1	80,1	80,1	
2	Indeks Kualitas Udara	84,4	1.Jumlah kota yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi kontinyu (AQMS) 2.Terlaksananya pemantauan kualitas udara untuk perhitungan indeks kualitas udara 3.Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu emisi	86,5 7	86,8 3	86,8 3	87, 15	86, 57	86,8 3	86,8 3	87,1 5	

3	Indesk Kualitas Tutupan Lahan	64,9	1.Luas lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang terpulihkan 2.Jumlah usaha dan/atau kegiatan tambang yang meningkat kinerja pengelolaan lingkungannya	62,1 5	62,1 6	62,1 6	62, 75	62, 15	62,1 6	62,1 6	62,7 5	
4	Indek Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)			42	44	44	46	42	44	44	46	
5	1. Nilai Indeks Pencemaran air			79,4 5	80,1	80,1	80, 1	79, 45	80,1	80,1	80,1	
6	2. Rata-rata Nilai indeks Pencemar Udara (SO2 dan NO2)			0,19	0,19	0,19	0,1 9	0,1 9	0,19	0,19	0,19	
7	3. Persentase luas tutupan lahan			62,1 5	62,1 6	62,1 6	62, 75	62, 15	62,1 6	62,1 6	62,7 5	
8	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup			71,4 2857	85,7 143	85,7 143	85, 714	71, 429	85,7 143	85,7 1429	85,7 143	
9	Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang ditetapkan dan dievaluasi			100	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota yang tersusun			0	100	100	100	0	100	100	100	
11	Cakupan pemantauan kualitas air			71,4 2857	85,7 143	85,7 143	100	71, 429	85,7 143	85,7 1429	100	
12	Cakupan pemantauan kualitas udara			100	100	100	100	100	100	100	100	
13	Presentase kampung iklim yang terbentuk			30	60	60	90	30	60	60	90	

14	Jumlah Dokumen Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang tersusun			2	2	2	2	2	2	2	2	
15	Luas lahan kritis yang direhabilitasi			1	1	1	1	1	1	1	1	
16	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota			75	75	75	75	75	75	75	75	
17	Jumlah data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/ kota			220	100	100	100	220	100	100	100	
18	Persentase pembentukan kader lingkungan tingkat desa/ kelurahan yang terbentuk			30	40	40	45	30	40	40	45	
19	Persentase sekolah yang sudah melaksanakan PBLHS (Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah tingkat kabupaten			15	20	20	25	15	20	20	25	
20	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan pembinaan Lingkungan Hidup			17,24 138	37,9 31	37,9 31	58,6 21	17,2 41	37,9 31	37,93 103	58,6 207	
21	Persentase sekolah yang sudah melaksanakan PBLHS (Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah tingkat kabupaten			10,34 483	20,6 897	20,6 897	20,6 9	10,3 45	20,6 897	20,68 966	20,6 897	

22	Jumlah Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten terbaik			3	9	9	9	3	9	9	9	
23	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diberikan kepada Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan			1	3	3	3	1	3	3	3	
24	Persentase pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / kota yang terselesaikan			100	100	100	100	100	100	100	100	
25	Persentase pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / kota yang terselesaikan			100	100	100	100	100	100	100	100	
26	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola			7,61	8,45	8,45	9,72	7,61	8,45	8,45	9,72	
27	Ruang Terbuka Hijau (RTH) terkelola dengan baik			18	20	20	23	18	20	20	23	
28	Persentase timbunan sampah yang tertangani			20,2	21,2	21,2	22,2	20,2	21,2	21,2	22,2	
29	Persentase usaha/ kegiatan yang menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang tertangani sesuai ketentuan			15	30	30	50	15	30	30	50	
30	Persentase timbunan sampah diperkotaan yang ditangani			69	71	71	73	69	71	71	73	

[illegible]

[illegible]

B. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Pada tahun 2017, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan menetapkan bahwa Tugas Pokok DLH Kabupaten Grobogan memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup. Sedangkan Fungsi DLH Kabupaten Grobogan adalah:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 tertuang isu-isu strategis yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup. Berdasarkan hasil identifikasi isu lingkungan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk RPJMD yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan. Mengacu pada hasil KLHS, terdapat sembilan isu lingkungan utama yang perlu diperhatikan di Kabupaten Grobogan. Isu – isu lingkungan tersebut antara lain:

- a. Belum optimalnya pengelolaan persampahan. Persentase pengangkutan sampah tahun 2020 sebesar 40%.
- b. Belum optimalnya capaian IKLH yang berada di angka 78 pada tahun 2020. Meskipun sudah termasuk dalam kondisi baik; begitu juga dengan capaian indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan yang hasilnya masih belum optimal.
- c. Belum optimalnya pengurangan sampah di perkotaan, tahun 2020 capaiannya baru 15%;
- d. Masih terdapat timbulan sampah di masyarakat yang belum terangkut, tahun 2020 sampah terangkut baru 40%. Masih terdapat 60 % sampah yang belum terangkut;
- e. Masih adanya usaha/kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan teknis pencegahan pencemaran udara. Dari data yang ada Pada tahun 2020 masih 30% usaha/kegiatan yang belum memenuhi persyaratan.
- f. Belum optimalnya cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL yang baru tercapai 50% di tahun 2020;

- g. Penyediaan luasan RTH publik belum optimal, ditahun 2020 baru mencapai 16 % dari target yang telah ditetapkan yaitu 20 %

Tingkat kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Grobogan berkurang dikarenakan adanya industrialisasi dan inventasi mulai menggeliat oleh karena itu banyak sekali lahan pertanian beralih fungsi. Di satu sisi perekonomian Kabuapten Grobogan meningkat di satu sisi tingkat pencemaran juga meningkat penurunan dan kerusakan kualitas lingkungan semakin terlihat, banyak sekali lahan-lahan pertanian beralih fungsi, udara semakin memanas akibat asap dari pabrik, limbah – limbah berbahaya yang di hasilkan pabrik juga menjadi permasalahan tersendiri adapun penurunan dan kerusakan kualitas lingkungan dapat dilihat dari uraian dibawah ini :

a. Limbah Cair

- Dalam aspek kelembagaan, adanya peleburan Dinas Kebersihan menjadi salah satu bidang di bawah Dinas Cipta Karya , Tata Ruang dan Kebersihan mengakibatkan adanya perubahan (penyempitan) tupoksi, wewenang serta beban kerja, khususnya terkait sektor kebersihan.
- Dalam sektor peraturan, belum optimalnya efektifitas penerapan peraturan daerah mengakibatkan belum optimalnya pula pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Grobogan
- Belum adanya kebijakan pembatasan perijinan terhadap industri- industri yang berpotensi menghasilkan limbah yang berat, baik limbah cair, limbah udara maupun limbah padat.
- Dalam sektor layanan pengelolaan, kurangnya ketersediaan infrastruktur pendukung pengelolaan air limbah domestik mengakibatkan masih rendahnya cakupan pelayanan air limbah domestic
- Dalam sektor partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik yang berkelanjutan mulai dari pembuangan awal hingga pembuangan akhir masih tergolong rendah. Selain dari pada itu, kesadaran masyarakat untuk mengelola limbah domestik secara komunal juga masih tergolong rendah
- Dalam sektor partisipasi sektor swasta, saat ini belum ada kerjasama secara khusus antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dalam hal pengelolaan air limbah domestic
- Dalam sektor komunikasi/sosial, kegiatan komunikasi/sosialisasi dalam pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Grobogan cenderung belum optimal.
- Dalam sektor limbah indsutri, isu strategis antara lain masih lemahnya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan pemerintah terhadap pengelolaan limbah oleh industri polutif.

b. Limbah Padat

- Belum efisiennya sistem pengangkutan sampah, pengangkutan sampah oleh truk masih dilakukan dari rumah ke rumah dan bukan dari TPST.
- Tidak adanya proses pengolahan sampah di TPS sehingga seluruh sampah dibawa ke TPA yang mana saat ini masih menerapkan sistem *open dumping*.
- Kurangnya kemandirian masyarakat dalam pengelolaan sampah, dimana seharusnya pengangkutan sampah dari rumah-rumah ke TPST dilakukan secara mandiri dengan menggunakan gerobak (yang sudah disiapkan pemerintah).
- Sangat tidak memadainya sarana prasarana TPA yang disebabkan tempatnya tidak luas
- Masih terbatasnya cakupan pelayanan sampah oleh pemerintah. Mengacu pada data Indikator Kinerja Daerah tahun 2022, baru sekitar 66.743 sampah di Kabupaten Grobogan yang tertangani. Adapun rasio daya tampung TPS terhadap jumlah penduduk yaitu sekitar 1:1.411.638, dimana satu TPS melayani sekitar 1.411.638 penduduk. Jika dibandingkan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di perkotaan, rasio TPS terhadap jumlah penduduk Kabupaten Grobogan tersebut cenderung masih dibawah standar.
- Kurangnya kesepahaman antara pemerintah dengan masyarakat Babakan dalam penyelenggaraan TPA sehingga masih terhambatnya pengangkutan sampah ke TPA.
- Masih rendahnya rasio Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) per satuan penduduk akibat kurangnya sarana dan prasarana fasilitas pengurangan sampah.
- Masih sedikitnya pembangunan pilot project sarana pengelolaan limbah domestik/puskesmas/ peternakan (kegiatan) akibat sulitnya mendapatkan industri/IKM yang kooperatif dan mau menerima program pengembangan produksi ramah lingkungan.
- Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana persampahan, ketersediaan armada, biaya dan keberadaan TPA.
- Belum optimalnya penerapan teknolog pengelolaan sampah karena belum menerapkan sanitary landfill (sebagian open dumping dan sebagian control landfill).
- Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam mengelola persampahan skala rumah tangga.

c. Polusi Udara

- Masih terdapat industri yang menghasilkan polusi udara
- Belum semua kendaraan lolos uji kelayakan kendaraan bermotor
- Pembakaran sampah masih kerap dipraktikan oleh masyarakat

Selain isu –isu yang termuat dalam RPJMD, terdapat isu yang berkembang selama proses kegiatan baik melalui rapat koordinasi atau melalui pengaduan. Isu-isu tersebut antara lain :

a. Isu-isu Utama Pengendalian Pencemaran Lingkungan

- Meningkatnya volume air limbah cair dari industri cukup besar;
- Belum adanya pembangunan sarana pengelolaan air limbah dalam skala komonitas;
- Kurangnya Pengelola LB3 yang beroperasi di wilayah Kabupaten Grobogan, banyaknya pengaduan masyarakat terkait kasus lingkungan;
- Banyaknya pelanggaran perizinan dasar yang berkaitan dengan kasus lingkungan;
- Belum Meratanya infrastruktur persampahan (TPST,Bank Sampah, Pengangkut sampah) di wilayah Kecamatan secara merata;
- Kurangnya ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan;
- Meningkatnya kuantitas sampah di Kabupaten Grobogan;
- Perlunya pemetanaan digital terhadap sumber-sumber yang berpotensi mencemari lingkungan hidup yang menunjukkan lokasi intensitas pencemaran secara akurat (industri,usaha,persampahan,polutan pupuk kimia dan pestisida).

b. Isu-isu Utama Konservasi dan Pengendalian Perusakan Lingkungan

- Banyaknya bekas galian para pencari posil di desa Banjarharjo Kecamatan Gabus,dan galian C yang tak terurus
- Belum adanya informasi jasa ekosistem yang terpadu dan komprehensif (neraca air, jasa ekosistem pangan,jasa ekosistem perlindungan banjir dan resapan air, jasa ekosistem tutupan lahan)
- Terbatasnya ruang terbuka hijau
- Konservasi kawasan karst daerah pegunungan kendeng utara
- Meningkatnya intensitas global warning
- Meningkatnya pencemaran tanah dan sumber daya air karena banyaknya industri bermunculan di Kabupaten Grobogan.

c. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan

KODE REK	RENCANA AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	Progra/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikat if	Progra/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutu han Dana	catat an penti ng
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kab.Gr ob	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	85,71	%	77.376.0 00	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kab.Gr ob	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	85,7 1	%	77.376.00 0	
2.11.02.2 .01	2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kab.Gr ob	Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang ditetapkan dan dievaluasi	100	%	20.000.0 00	2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kab.Gr ob	Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang ditetapkan dan dievaluasi	100	%	20.000.00 0	
2.11.02.2 .01	2.11.02.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab.Gr ob	Dokumen RPPLH yang disusun dan ditetapkan	1	dokumen	10.000.0 00	2.11.02.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab.Gr ob	Dokumen RPPLH yang disusun dan ditetapkan	1	dokumen	10.000.00 0	

2.11.02.2.01	2.11.02.2.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab.Gr ob	Dokumen pengendalian pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota yang tersusun	1	dokumen	10000000	2.11.02.2.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab.Gr ob	Dokumen pengendalian pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota yang tersusun	1	dokumen	10000000	
2.11.02.2.02	2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kab.Gr ob	Persentase Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota yang tersusun	100	dokumen	57376000	2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kab.Gr ob	Persentase Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota yang tersusun	100	dokumen	57376000	
2.11.02.2.02	2.11.02.2.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Kab.Gr ob	Dokumen KLHS RTRW yang tersusun	1	dokumen	27376000	2.11.02.2.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Kab.Gr ob	Dokumen KLHS RTRW yang tersusun	1	dokumen	27376000	
2.11.02.2.02	2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kab.Gr ob	Dokumen KLHS RPJMD/ RPJPD yang tersusun	2	dokumen	30000000	2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kab.Gr ob	Dokumen KLHS RPJMD/ RPJPD yang tersusun	2	dokumen	30000000	

2.11.02.2.02	2.11.02.2.02.03 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Kab.Gr ob	Dokumen KLHS KRP yang Berpotensi menimbulkan dampak/ resiko lingkungan hidup yang tersusun	0	dokumen	0	2.11.02.2.02.03 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Kab.Gr ob	Dokumen KLHS KRP yang Berpotensi menimbulkan dampak/ resiko lingkungan hidup yang tersusun	0	dokumen	0	
	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab.Gr ob	Cakupan pemantauan kualitas air	100	%	2385826 525	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab.Gr ob	Cakupan pemantauan kualitas air	100	%	23858265 25	
		Kab.Gr ob	Cakupan pemantauan kualitas udara	100	%			Kab.Gr ob	Cakupan pemantauan kualitas udara	100	%		
2.11.03.2.01	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab.Gr ob	Presentase kampung iklim yang terbentuk	90	%	1385826 525	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab.Gr ob	Presentase kampung iklim yang terbentuk	90	%	13858265 25	

2.11.03.2.01	2.11.03.2.01.01 koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air Udara dan laut	Kab.Gr ob	Koordinasi dan sinkronisasi adipura yang dilaksanakan	5	kali	300000000	2.11.03.2.01.01 koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air Udara dan laut	Kab.Gr ob	Koordinasi dan sinkronisasi adipura yang dilaksanakan	5	kali	300000000	
		Kab.Gr ob	Jumlah peserta lomba LBS	19	kelompok masyarakat	200000000		Kab.Gr ob	Jumlah peserta lomba LBS	19	kelompok masyarakat	200000000	
		Kab.Gr ob	Pembangunan IPAL tahu dan tempe	0	unit	0		Kab.Gr ob	Pembangunan IPAL tahu dan tempe	0	unit	0	
		Kab.Gr ob	Pengadaan Onlino	1	paket	300000000		Kab.Gr ob	Pengadaan Onlino	1	paket	300000000	
2.11.03.2.01	2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab.Gr ob	Kampung iklim yang terbentuk dan dibina	6	lokasi	250000000	2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab.Gr ob	Kampung iklim yang terbentuk dan dibina	6	lokasi	250000000	

		Kab.Gr ob	Dokumen inventarisasi Gas Rumah Kaca yang tersusun	0	Dok	0		Kab.Gr ob	Dokumen inventarisasi Gas Rumah Kaca yang tersusun	0	Dok	0	
2.11.03.2 .01	2.11.03.2.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Kab.Gr ob	Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium	1	unit	3358265 25	2.11.03.2.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Kab.Gr ob	Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium	1	unit	33582652 5	
2.11.03.2 .02	2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab.Gr ob	Jumlah Dokumen Penanggulan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang tersusun	2	dokumen	3000000 00	2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab.Gr ob	Jumlah Dokumen Penanggulan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang tersusun	2	dokumen	30000000 0	
2.11.03.2 .02	2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab.Gr ob	1. Dokumen IKPLHD yang disusun tiap tahun	1	dokumen	1000000 00	2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab.Gr ob	1. Dokumen IKPLHD yang disusun tiap tahun	1	dokumen	10000000 0	
		Kab.Gr ob	2. Dokumen IKLH yang disusun tiap tahun	1	dokumen	1000000 00		Kab.Gr ob	2. Dokumen IKLH yang disusun tiap tahun	1	dokumen	10000000 0	

		Kab.Gr ob	3. Jumlah lokasi pengujian air dan udara ambien	45	lokasi	1000000 00		Kab.Gr ob	3. Jumlah lokasi pengujian air dan udara ambien	45	lokasi	10000000 0	
2.11.03.2 .03	2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab.Gr ob	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	1	Ha	7000000 00	2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab.Gr ob	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	1	Ha	70000000 0	
2.11.03.2 .03	2.11.03.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemaran	Kab.Gr ob	Aksi Program Prokasih yang dilaksanakan	2	lokasi	1500000 00	2.11.03.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemaran	Kab.Gr ob	Aksi Program Prokasih yang dilaksanakan	2	lokasi	15000000 0	
2.11.03.2 .03	2.11.03.2.03.04 Koordinasi, Sinkronikasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kab.Gr ob	1. Kelompok yang menerima bantuan bibit	5	Kelompok	3500000 00	2.11.03.2.03.04 Koordinasi, Sinkronikasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kab.Gr ob	1. Kelompok yang menerima bantuan bibit	5	Kelompok	35000000 0	
		Kab.Gr ob	2. Pengadaan pupuk dan bibit tanaman hias	0	jens	0		Kab.Gr ob	2. Pengadaan pupuk dan bibit tanaman hias	0	jens	0	

		Kab.Gr ob	3. Rehabilitasi lahan dengan cara sipil teknis (sumur resapan, gully plug dan dam penahan) yang terbangun	200	unit	2000000 00		Kab.Gr ob	3. Rehabilitasi lahan dengan cara sipil teknis (sumur resapan, gully plug dan dam penahan) yang terbangun	200	unit	20000000 0	
		Kab.Gr ob	4. Dam penahan yang terbangun	2	unit	1000000 00		Kab.Gr ob	4. Dam penahan yang terbangun	2	unit	10000000 0	

	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Kab.Gr ob	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	75,00	%	9672000 0	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Kab.Gr ob	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	75,00	%	96720000	
2.11.06.2 .01	2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin	Kab.Gr ob	Jumlah data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/ kota	100	usaha/kegi atan	9672000 0	2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin	Kab.Gr ob	Jumlah data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/ kota	100	usaha/kegi atan	96720000	

2.11.06.2.01	2.11.06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab.Gr ob	Usaha dan/atau Kegiatan yang difasilitasi pemenuhan persetujuan lingkungan	50	usaha/kegiatan	50000000	2.11.06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab.Gr ob	Usaha dan/atau Kegiatan yang difasilitasi pemenuhan persetujuan lingkungan	50	usaha/kegiatan	50000000	
		Kab.Gr ob	Usaha dan/atau Kegiatan yang difasilitasi pemenuhan persetujuan lingkungan	0	dok	0		Kab.Gr ob	Usaha dan/atau Kegiatan yang difasilitasi pemenuhan persetujuan lingkungan	0	dok	0	
2.11.06.2.01	2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Gr ob	Usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh persetujuan Lingkungan Hidup yang dievaluasi	50	perusahaan	21000000	2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Gr ob	Usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh persetujuan Lingkungan Hidup yang dievaluasi	50	perusahaan	21000000	

2.11.06.2.01	2.11.06.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Kab.Gr ob	Usaha/kegiatan yang yang diawasi	10	usaha/kegiatan	25720000	2.11.06.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Kab.Gr ob	Usaha/kegiatan yang yang diawasi	10	usaha/kegiatan	25720000	
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kab.Gr ob	Persentase pembentukan kader lingkungan tingkat desa/ kelurahan yang terbentuk	45	%	24180000	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kab.Gr ob	Persentase pembentukan kader lingkungan tingkat desa/ kelurahan yang terbentuk	45	%	24180000	
		Kab.Gr ob	Persentase sekolah yang sudah melaksanakan PBLHS (Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah tingkat kabupaten	25	%			Kab.Gr ob	Persentase sekolah yang sudah melaksanakan PBLHS (Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah tingkat kabupaten	25	%		

2.11.08.2 .01	2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Gr ob	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan pembinaan Lingkungan Hidup	#### ##	%	2418000 0	2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Gr ob	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan pembinaan Lingkungan Hidup	### ##	%	24180000	
		Kab.Gr ob		#DIV/ 0!				Kab.Gr ob		### ##			
2.11.08.2 .01	2.11.08.2.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kab.Gr ob	Jumlah anggota saka kalpataru yang dibina	10	orang	5000000	2.11.08.2.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kab.Gr ob	Jumlah anggota saka kalpataru yang dibina	10	orang	5000000	

		Kab.Gr ob	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya di bidang Lingkungan Hidup	10	orang	7180000		Kab.Gr ob	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya di bidang Lingkungan Hidup	10	orang	7180000	
2.11.08.2 .01	2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab.Gr ob	Pelaksanaan gerakan peduli lingkungan hidup (Gerakan PBLHS) yang dilakukan	10	sekolah	5000000	2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab.Gr ob	Pelaksanaan gerakan peduli lingkungan hidup (Gerakan PBLHS) yang dilakukan	10	sekolah	5000000	
2.11.08.2 .01	2.11.08.2.01.03 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab.Gr ob	pelaksanaan car free day	47	kali	7000000	2.11.08.2.01.03 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab.Gr ob	pelaksanaan car free day	47	kali	7000000	

	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kab.Gr ob	Jumlah Masyarakat/Duni a Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten terbaik	9	penerima penghargaan terbaik	5319600 0	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kab.Gr ob	Jumlah Masyarakat/Duni a Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten terbaik	9	penerima penghargaan terbaik	53196000	
2.11.09.2 .01	2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Gr ob	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diberikan kepada Masyarakat/Duni a Usaha/Dunia Pendidikan	3	penerima penghargaan terbaik	5319600 0	2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Gr ob	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diberikan kepada Masyarakat/Duni a Usaha/Dunia Pendidikan	3	penerima penghargaan terbaik	53196000	

2.11.09.2.01	2.11.09.2.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab.Gr ob	Jumlah kegiatan penilaian kinerja Masyarakat/Duni a Usaha/Dunia Pendidikan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	20	kali	53196000	2.11.09.2.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab.Gr ob	Jumlah kegiatan penilaian kinerja Masyarakat/Duni a Usaha/Dunia Pendidikan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	20	kali	53196000	
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Kab.Gr ob	Persentase pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / kota yang terselesaikan	100	%	38688000	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Kab.Gr ob	Persentase pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / kota yang terselesaikan	100	%	38688000	

2.11.10.2 .01	2.11.10.2.01 Penyelesaiam Pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / kota	Kab.Gr ob	Persentase pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / kota yang terselesaikan	100	%	3868800 0	2.11.10.2.01 Penyelesaiam Pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / kota	Kab.Gr ob	Persentase pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / kota yang terselesaikan	100	%	38688000	
2.11.10.2 .01	2.11.10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kab.Gr ob	Layanan aduan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1	aduan	1000000 0	2.11.10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kab.Gr ob	Layanan aduan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1	aduan	10000000	

2.11.10.2.01	2.11.10.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Kab.Gr ob	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	10	kali	28688000	2.11.10.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Kab.Gr ob	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	10	kali	28688000	
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Kab.Gr ob	Presentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	9,72	%	2385826525	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Kab.Gr ob	Presentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	9,72	%	2385826525	
2.11.04.2.01	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kab.Gr ob	Ruang Terbuka Hijau (RTH) terkelola dengan baik	23	lokasi	2385826525	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kab.Gr ob	Ruang Terbuka Hijau (RTH) terkelola dengan baik	23	lokasi	2385826525	
2.11.04.2.01	2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab.Gr ob	Terkelolanya Hutan Kota Purwodadi	1	lokasi	25000000	2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab.Gr ob	Terkelolanya Hutan Kota Purwodadi	1	lokasi	25000000	

2.11.04.2 .01	2.11.04.2.01.05 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Kab.Gr ob	Terpeliharanya Taman Kota	22	lokasi	1500000 000	2.11.04.2.01.05 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Kab.Gr ob	Terpeliharanya Taman Kota	22	lokasi	1500000 00	
2.11.04.2 .01	2.11.04.2.01.07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kab.Gr ob	Sarana dan Prasarana Taman Kota yang ditingkatkan dan ditata	2	lokasi	4000000 00	2.11.04.2.01.07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kab.Gr ob	Sarana dan Prasarana Taman Kota yang ditingkatkan dan ditata	2	lokasi	4000000 0	
		Kab.Gr ob		0	lokasi	0		Kab.Gr ob		0	lokasi	0	
		Kab.Gr ob		0	lokasi	0		Kab.Gr ob		0	lokasi	0	
		Kab.Gr ob		1	lokasi	2358265 25		Kab.Gr ob		1	lokasi	23582652 5	
		Kab.Gr ob		0	lokasi	0		Kab.Gr ob		0	lokasi	0	
		Kab.Gr ob		0	lokasi	0		Kab.Gr ob		0	lokasi	0	
		Kab.Gr ob	Persentase timbukan sampah yang tertangani	22,20	%			Kab.Gr ob	Persentase timbukan sampah yang tertangani	22,2 0	%		

		Kab.Gr ob	Persentase usaha/ kegiatan yang menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang tertangani sesuai ketentuan	50	%			Kab.Gr ob	Persentase usaha/ kegiatan yang menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang tertangani sesuai ketentuan	50	%		
	Program Pengelolaan Persampahan	Kab.Gr ob	Persentase timbulan sampah diperkotaan yang ditangani	73	%	7038930 138	Program Pengelolaan Persampahan	Kab.Gr ob	Persentase timbulan sampah diperkotaan yang ditangani	73	%	70389301 38	
2.11.11.2 .01	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Kab.Gr ob	Volume pengurangan sampah	192	ton/ tahun	7038930 138	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Kab.Gr ob	Volume pengurangan sampah	192	ton/ tahun	70389301 38	
2.11.11.2 .01	2.11.11.2.01.01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kab.Gr ob	1. Dokumen kebijakan dan strategi daerah (jakstrada) persampahan yang tersusun	0	dok	0	2.11.11.2.01.01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kab.Gr ob	1. Dokumen kebijakan dan strategi daerah (jakstrada) persampahan yang tersusun	0	dok	0	

		Kab.Gr ob	2. Dokumen naskah akademik dan review Perda Persampahan yang tersusun	1	dok	5000000 0		Kab.Gr ob	2. Dokumen naskah akademik dan review Perda Persampahan yang tersusun	1	dok	50000000	
		Kab.Gr ob	3. Dokumen FS/ DED TPA Sampah yang tersusun	0	dok	0		Kab.Gr ob	3. Dokumen FS/ DED TPA Sampah yang tersusun	0	dok	0	
		Kab.Gr ob	4. Perbup pengelolaan sampah yang tersusun	0	dok	0		Kab.Gr ob	4. Perbup pengelolaan sampah yang tersusun	0	dok	0	
2.11.11.2 .01	2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kab.Gr ob	KSM/ Bank Sampah yang terbantuk dan terbina	6	unit	1000000 0	2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kab.Gr ob	KSM/ Bank Sampah yang terbantuk dan terbina	6	unit	10000000	
		Kab.Gr ob	Pengadaan peralatan operasional KSM/ Bank Sampah	5	unit	1000000 0		Kab.Gr ob	Pengadaan peralatan operasional KSM/ Bank Sampah	5	unit	10000000	

2.11.11.2.01	2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/Kota	Kab.Gr ob	1. Volume ampah yang tertangani di TPA	80	ton/ hari	6250000 000	2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/Kota	Kab.Gr ob	1. Volume ampah yang tertangani di TPA	80	ton/ hari	6250000 00	
		Kab.Gr ob	2. Kegiatan patroli dan evakuasi sampah liar yang dilaksanakan	72	kali/ tahun	1000000 0		Kab.Gr ob	2. Kegiatan patroli dan evakuasi sampah liar yang dilaksanakan	72	kali/ tahun	10000000	
2.11.11.2.01	2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab.Gr ob	1. Kelompok masyarakat yang terbina	5	kelompok	1000000 0	2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab.Gr ob	1. Kelompok masyarakat yang terbina	5	kelompok	10000000	
		Kab.Gr ob	2. Kelompok masyarakat yang memperoleh bantuan	5	kelompok	1000000 0		Kab.Gr ob	2. Kelompok masyarakat yang memperoleh bantuan	5	kelompok	10000000	

2.11.11.2.01	2.11.11.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kab.Gr ob	Rapat koordinasi prasarana dan sarana pengelolaan persampahan yang dilakukan		kali		2.11.11.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kab.Gr ob	Rapat koordinasi prasarana dan sarana pengelolaan persampahan yang dilakukan		kali		
2.11.11.2.01	2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab.Gr ob	Pengadaan bulldozer dan excavator	1	unit	521930138	2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab.Gr ob	Pengadaan bulldozer dan excavator	1	unit	521930138	
		Kab.Gr ob	Pengadaan incenerator dengan proses firolisis	0	unit	0		Kab.Gr ob	Pengadaan incenerator dengan proses firolisis	0	unit	0	
		Kab.Gr ob	Pengadaan Kontainer sampah	1	unit	33000000		Kab.Gr ob	Pengadaan Kontainer sampah	1	unit	33000000	
		Kab.Gr ob	Pengadaan tempat sampah	20	unit	24000000		Kab.Gr ob	Pengadaan tempat sampah	20	unit	24000000	
		Kab.Gr ob	Pengadaan mesin pencacah sampah	0	unit	0		Kab.Gr ob	Pengadaan mesin pencacah sampah	0	unit	0	

		Kab.Gr ob	Pengadaan mesin pemilah sampah plastik	0	unit	0		Kab.Gr ob	Pengadaan mesin pemilah sampah plastik	0	unit	0	
		Kab.Gr ob	Panjang pagar keliling TPA yang terbangun	100	m	1100000 00		Kab.Gr ob	Panjang pagar keliling TPA yang terbangun	100	m	1100000 0	
		Kab.Gr ob	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung operasional IPAL	-	unit	0		Kab.Gr ob	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung operasional IPAL	-	unit	0	
		Kab.Gr ob	Panjang saluran TPA yang direhabilitasi	0	m	0		Kab.Gr ob	Panjang saluran TPA yang direhabilitasi	0	m	0	
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Kab.Gr ob	Persentase pelaku usaha dan/atau kegiatan yang telah memenuhi rincian teknis pengelolaan limbah B3	62,50	%	7254000 0	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Kab.Gr ob	Persentase pelaku usaha dan/atau kegiatan yang telah memenuhi rincian teknis pengelolaan limbah B3	62,5 0	%	72540000	

2.11.05.2.01	2.11.05.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab.Gr ob	Jumlah pelaku usaha/ dan atau kegiatan yang telah memenuhi rincian teknis pengelolaan limbah B3	125	pelaku usaha dan/ atau kegiatan	72540000	2.11.05.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab.Gr ob	Jumlah pelaku usaha/ dan atau kegiatan yang telah memenuhi rincian teknis pengelolaan limbah B3	125	pelaku usaha dan/ atau kegiatan	72540000	
2.11.05.2.01	2.11.05.2.01.02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab.Gr ob	Pelaku usaha dan/ atau kegiatan penghasil LB3 yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis TPS LB3	125	pelaku usaha dan/ atau kegiatan	72540000	2.11.05.2.01.02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab.Gr ob	Pelaku usaha dan/ atau kegiatan penghasil LB3 yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis TPS LB3	125	pelaku usaha dan/ atau kegiatan	72540000	
		Kab.Gr ob	Nilai SAKIP perangkat daerah	82	Nilai			Kab.Gr ob	Nilai SAKIP perangkat daerah	82	Nilai		
		Kab.Gr ob	Nilai IKM	77,70 (B)	Nilai			Kab.Gr ob	Nilai IKM	77,70 (B)	Nilai		

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab.Gr ob	Persentase Laporan keuangan sesuai Standart Akuntansi Publik	100	%	8602974 086	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab.Gr ob	Persentase Laporan keuangan sesuai Standart Akuntansi Publik	100	%	86029740 86	
		Kab.Gr ob	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang kinerja urusan pemerintah daerah meliputi administrasi keuangan, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang, pemeliharaan BMD	100	%			Kab.Gr ob	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang kinerja urusan pemerintah daerah meliputi administrasi keuangan, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang, pemeliharaan BMD	100	%		
		Kab.Gr ob	Persentase pemenuhan dokumen area penilaian manajemen resiko	100	%			Kab.Gr ob	Persentase pemenuhan dokumen area penilaian manajemen resiko	100	%		

X.XX.01.2.01	X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Gr ob	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	100	%	8000000	X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Gr ob	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	100	%	8000000	
X.XX.01.2.01	X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Gr ob	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	4	dok	2000000	X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Gr ob	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	4	dok	2000000	
X.XX.01.2.01	X.XX.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Gr ob	Dokumen RKA- SKPD yang tersusun	25	dok	2000000	X.XX.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Gr ob	Dokumen RKA- SKPD yang tersusun	25	dok	2000000	
X.XX.01.2.01	X.XX.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab.Gr ob	Dokumen Perubahan RKA- SKPD yang tersusun		dok		X.XX.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab.Gr ob	Dokumen Perubahan RKA- SKPD yang tersusun		dok		
X.XX.01.2.01	X.XX.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab.Gr ob	Dokumen DPA- SKPD yang tersusun		dok		X.XX.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab.Gr ob	Dokumen DPA- SKPD yang tersusun		dok		

X.XX.01.2.01	X.XX.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab.Gr ob	Dokumen Perubahan DPA- SKPD yang tersusun	12	dok	2000000	X.XX.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab.Gr ob	Dokumen Perubahan DPA- SKPD yang tersusun	12	dok	2000000	
X.XX.01.2.01	X.XX.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Gr ob	Dokumen LKJIP yang tersusun	1	dok	2000000	X.XX.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Gr ob	Dokumen LKJIP yang tersusun	1	dok	2000000	
X.XX.01.2.02	X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Gr ob	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100	%	5613453 000	X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Gr ob	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100	%	56134530 00	
X.XX.01.2.02	X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Gr ob	Pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	14	bulan	5609453 000	X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Gr ob	Pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	14	bulan	56094530 00	

X.XX.01.2.05	X.XX.01.2.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Gr ob	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	dokumen	2000000	X.XX.01.2.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Gr ob	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	dokumen	2000000	
X.XX.01.2.07	X.XX.01.2.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Kab.Gr ob	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD tersusun	24	dokumen	2000000	X.XX.01.2.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Kab.Gr ob	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD tersusun	24	dokumen	2000000	
X.XX.01.2.05	X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Gr ob	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	100	%	8500000 0	X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Gr ob	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	100	%	85000000	
X.XX.01.2.05	X.XX.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Gr ob	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40	stel	2500000 0	X.XX.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Gr ob	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40	stel	25000000	

X.XX.01.2.05	X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Gr ob	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10	orang	10000000	X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Gr ob	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10	orang	10000000	
X.XX.01.2.05	X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Gr ob	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30	orang	50000000	X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Gr ob	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30	orang	50000000	
X.XX.01.2.06	X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Gr ob	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	735000000	X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Gr ob	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	735000000	
X.XX.01.2.06	X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Gr ob	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50	unit	20000000	X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Gr ob	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50	unit	20000000	

X.XX.01. 2.06	X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Gr ob	Tersedianya perlatan dan perlengkapan kantor	20	unit	2500000 0	X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Gr ob	Tersedianya perlatan dan perlengkapan kantor	20	unit	25000000	
		Kab.Gr ob	Pengadaan korden	0	m	0		Kab.Gr ob	Pengadaan korden	0	m	0	
		Kab.Gr ob	Pengadaan peralatan makan minum	0	unit	0		Kab.Gr ob	Pengadaan peralatan makan minum	0	unit	0	
X.XX.01. 2.06	X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Gr ob	Tercukupinya kebutuhan makan dan minum untuk keperluan kantor	130	kali	2000000 00	X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Gr ob	Tercukupinya kebutuhan makan dan minum untuk keperluan kantor	130	kali	20000000 0	
X.XX.01. 2.06	X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Gr ob	Karcis retribusi persampahan yang tercetak	250	bendel	1000000 0	X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Gr ob	Karcis retribusi persampahan yang tercetak	250	bendel	10000000	
		Kab.Gr ob	Spanduk yang tercetak	10	buah	1000000 0		Kab.Gr ob	Spanduk yang tercetak	10	buah	10000000	

X.XX.01.2.06	X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Gr ob	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	3	eksemplar	1500000 0	X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Gr ob	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	3	eksemplar	1500000	
X.XX.01.2.06	X.XX.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Kab.Gr ob	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	7.000	buah	1500000 00	X.XX.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Kab.Gr ob	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	7.000	buah	1500000 0	
X.XX.01.2.06	X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Gr ob	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah	350	kali	3000000 00	X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Gr ob	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah	350	kali	3000000 0	
X.XX.01.2.06	X.XX.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab.Gr ob	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang terkelola	25	dokumen	5000000	X.XX.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab.Gr ob	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang terkelola	25	dokumen	5000000	
X.XX.01.2.07	X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Gr ob	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100	%	7005210 86	X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Gr ob	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100	%	70052108 6	

X.XX.01. 2.07	X.XX.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Gr ob	Jumlah pengadaan kendaraan sampah roda 3	5	unit	1365210 86	X.XX.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Gr ob	Jumlah pengadaan kendaraan sampah roda 3	5	unit	13652108 6	
		Kab.Gr ob	Jumlah pengadaan dump truk	1	unit	5000000 00		Kab.Gr ob	Jumlah pengadaan dump truk	1	unit	50000000 0	
		Kab.Gr ob	Jumlah pengadaan amroll	0	unit	0		Kab.Gr ob	Jumlah pengadaan amroll	0	unit	0	
X.XX.01. 2.07	X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Kab.Gr ob	Jumlah Mebel yang diadakan	5	unit	2000000 0	X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Kab.Gr ob	Jumlah Mebel yang diadakan	5	unit	20000000	
X.XX.01. 2.07	X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Gr ob	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	2	unit	2000000 0	X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Gr ob	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	2	unit	20000000	
		Kab.Gr ob	Pengadaan AC	1	unit	4000000		Kab.Gr ob	Pengadaan AC	1	unit	4000000	
		Kab.Gr ob	Pengadaan Laptop	1	unit	5000000		Kab.Gr ob	Pengadaan Laptop	1	unit	5000000	
		Kab.Gr ob	Pengadaan PC	1	unit	5000000		Kab.Gr ob	Pengadaan PC	1	unit	5000000	
		Kab.Gr ob	Pengadaan CCTV	1	unit	5000000		Kab.Gr ob	Pengadaan CCTV	1	unit	5000000	
		Kab.Gr ob	Pengadaan printer	2	unit	5000000		Kab.Gr ob	Pengadaan printer	2	unit	5000000	

X.XX.01.2.07	X.XX.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Gr ob	Pembangunan gedung kantor atau bangunan lainnya	0	unit	0	X.XX.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Gr ob	Pembangunan gedung kantor atau bangunan lainnya	0	unit	0	
X.XX.01.2.08	X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Gr ob	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	755000000	X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Gr ob	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	755000000	
X.XX.01.2.08	X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Gr ob	Pemenuhan kebutuhan surat menyurat	12	bulan	5000000	X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Gr ob	Pemenuhan kebutuhan surat menyurat	12	bulan	5000000	
X.XX.01.2.08	X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Gr ob	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	200000000	X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Gr ob	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	200000000	
X.XX.01.2.08	X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Gr ob	Pemebuhan pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	bulan	550000000	X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Gr ob	Pemebuhan pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	bulan	550000000	

X.XX.01. 2.09	X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Gr ob	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	%	7100000 00	X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Gr ob	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	%	71000000 0	
X.XX.01. 2.09	X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Gr ob	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	bulan	6000000 00	X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Gr ob	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	bulan	60000000 0	
X.XX.01. 2.09	X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Gr ob	Peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	10	unit	1000000 0	X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Gr ob	Peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	10	unit	10000000	
X.XX.01. 2.09	X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Gr ob	Gedung Kantor dan bangunan lainnya terehabilitasi/terp elihara	2	unit	1000000 00	X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Gr ob	Gedung Kantor dan bangunan lainnya terehabilitasi/terp elihara	2	unit	10000000 0	

D. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam menyusun RKPD, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang. Selain itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah harus mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan daerah melalui perencanaan pembangunan daerah yaitu Musrenbang pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota , provinsi dan Nasional. Melalui Musrenbang diharapkan dapat mensinkronkan dan merekonsiliasikan pendektan *top down* dan *bottom up*. Pada table berikut ini dapat dilihat usulan kegiatan sesuai hasil musrenbang Tahun 2018

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan

Program/ Kegiatan	Lokas i	Indikator Kinerja	Besaran /Volume		Pagu Indikatif
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kab.Gro b	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	85,71	%	77.376.000
2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kab.Gro b	Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang ditetapkan dan dievaluasi	100	%	20.000.000
2.11.02.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab.Gro b	Dokumen RPPLH yang disusun dan ditetapkan	1	dokumen	10.000.000

2.11.02.2.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab.Gro b	Dokumen pengendalian pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota yang tersusun	1	dokumen	10.000.000
2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kab.Gro b	Persentase Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota yang tersusun	100	dokumen	57.376.000
2.11.02.2.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Kab.Gro b	Dokumen KLHS RTRW yang tersusun	1	dokumen	27.376.000
2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kab.Gro b	Dokumen KLHS RPJMD/ RPJPD yang tersusun	2	dokumen	30.000.000
2.11.02.2.02.03 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Kab.Gro b	Dokumen KLHS KRP yang Berpotensi menimbulkan dampak/ resiko lingkungan hidup yang tersusun	0	dokumen	-
Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab.Gro b	Cakupan pemantauan kualitas air	100	%	2.385.826.525

	Kab.Gro b	Cakupan pemantauan kualitas udara	100	%	
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab.Gro b	Presentase kampung iklim yang terbentuk	90	%	1.385.826.525
2.11.03.2.01.01 koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air Udara dan laut	Kab.Gro b	Koordinasi dan sinkronisasi adipura yang dilaksanakan	5	kali	300.000.000
	Kab.Gro b	Jumlah peserta lomba LBS	19	kelompok masyarakat	200.000.000
	Kab.Gro b	Pembangunan IPAL tahu dan tempe	0	unit	-
	Kab.Gro b	Pengadaan Onlimo	1	paket	300.000.000

2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab.Gro b	Kampung iklim yang terbentuk dan dibina	6	lokasi	250.000.000
	Kab.Gro b	Dokumen inventarisasi Gas Rumah Kaca yang tersusun	0	Dok	-
2.11.03.2.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Kab.Gro b	Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium	1	unit	335.826.525
2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab.Gro b	Jumlah Dokumen Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang tersusun	2	dokumen	300.000.000
2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab.Gro b	1. Dokumen IKPLHD yang disusun tiap tahun	1	dokumen	100.000.000
	Kab.Gro b	2. Dokumen IKLH yang disusun tiap tahun	1	dokumen	100.000.000

	Kab.Gro b	3. Jumlah lokasi pengujian air dan udara ambien	45	lokasi	100.000.000
2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab.Gro b	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	1	Ha	700.000.000
2.11.03.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemaran	Kab.Gro b	Aksi Program Prokasih yang dilaksanakan	2	lokasi	150.000.000
2.11.03.2.03.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabiltasi	Kab.Gro b	1. Kelompok yang menerima bantuan bibit	5	Kelompok	350.000.000
	Kab.Gro b	2. Pengadaan pupuk dan bibit tanaman hias	0	jens	-
	Kab.Gro b	3. Rehabilitasi lahan dengan cara sipil teknis (sumur resapan, gully plug dan dam penahan) yang terbangun	200	unit	200.000.000

	Kab.Gro b	4. Dam penahan yang terbangun	2	unit	100.000.000
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Kab.Gro b	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	75,00	%	96.720.000
2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin	Kab.Gro b	Jumlah data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/ kota	100	usaha/kegiatan	96.720.000
2.11.06.2.01.01 Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab.Gro b	Usaha dan/atau Kegiatan yang difasilitasi pemenuhan persetujuan lingkungan	50	usaha/kegiatan	50.000.000
	Kab.Gro b	Usaha dan/atau Kegiatan yang difasilitasi pemenuhan persetujuan lingkungan	0	dok	-
2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Gro b	Usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh persetujuan Lingkungan Hidup yang dievaluasi	50	perusahaan	21.000.000

2.11.06.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Kab.Gro b	Usaha/kegiatan yang yang diawasi	10	usaha/kegiatan	25.720.000
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kab.Gro b	Persentase pembentukan kader lingkungan tingkat desa/ kelurahan yang terbentuk	45	%	24.180.000
	Kab.Gro b	Persentase sekolah yang sudah melaksanakan PBLHS (Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah tingkat kabupaten	25	%	
2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Gro b	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan pembinaan Lingkungan Hidup	#VALUE!	%	24.180.000
	Kab.Gro b		#DIV/0!		
2.11.08.2.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kab.Gro b	Jumlah anggota saka kalpataru yang dibina	10	orang	5.000.000

	Kab.Gro b	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya di bidang Lingkungan Hidup	10	orang	7.180.000
2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab.Gro b	Pelaksanaan gerakan peduli lingkungan hidup (Gerakan PBLHS) yang dilakukan	10	sekolah	5.000.000
2.11.08.2.01.03 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab.Gro b	pelaksanaan car free day	47	kali	7.000.000
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kab.Gro b	Jumlah Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten terbaik	9	penerima penghargaan terbaik	53.196.000
2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Gro b	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diberikan kepada Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan	3	penerima penghargaan terbaik	53.196.000
2.11.09.2.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab.Gro b	Jumlah kegiatan penilaian kinerja Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	20	kali	53.196.000

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Kab.Gro b	Persentase pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / kota yang terselesaikan	100	%	38.688.000
2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / kota	Kab.Gro b	Persentase pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / kota yang terselesaikan	100	%	38.688.000
2.11.10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kab.Gro b	Layanan aduan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1	aduan	10.000.000
2.11.10.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Kab.Gro b	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	10	kali	28.688.000
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Kab.Gro b	Presentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	9,72	%	2.385.826.525
2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kab.Gro b	Ruang Terbuka Hijau (RTH) terkelola dengan baik	23	lokasi	2.385.826.525

2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab.Gro b	Terkelolanya Hutan Kota Purwodadi	1	lokasi	250.000.000
2.11.04.2.01.05 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Kab.Gro b	Terpeliharanya Taman Kota	22	lokasi	1.500.000.000
2.11.04.2.01.07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kab.Gro b	Sarana dan Prasarana Taman Kota yang ditingkatkan dan ditata	2	lokasi	400.000.000
	Kab.Gro b		0	lokasi	-
	Kab.Gro b		0	lokasi	-
	Kab.Gro b		1	lokasi	235.826.525

	Kab.Gro b		0	lokasi	
	Kab.Gro b		0	lokasi	
	Kab.Gro b	Persentase timbukan sampah yang tertangani	22,20	%	
	Kab.Gro b	Persentase usaha/ kegiatan yang menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang tertangani sesuai ketentuan	50	%	
Program Pengelolaan Persampahan	Kab.Gro b	Persentase timbulan sampah diperkotaan yang ditangani	73	%	7.038.930.138
2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Kab.Gro b	Volume pengurangan sampah	192	ton/ tahun	7.038.930.138

2.11.11.2.01.01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kab.Gro b	1. Dokumen kebijakan dan strategi daerah (jakstrada) persampahan yang tersusun	0	dok	-
	Kab.Gro b	2. Dokumen naskah akademik dan review Perda Persampahan yang tersusun	1	dok	50.000.000
	Kab.Gro b	3. Dokumen FS/ DED TPA Sampah yang tersusun	0	dok	-
	Kab.Gro b	4. Perbup pengelolaan sampah yang tersusun	0	dok	-
2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kab.Gro b	KSM/ Bank Sampah yang terbantu dan terbina	6	unit	10.000.000
	Kab.Gro b	Pengadaan peralatan operasional KSM/ Bank Sampah	5	unit	10.000.000

2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/Kota	Kab.Gro b	1. Volume ampah yang tertangani di TPA	80	ton/ hari	6.250.000.000
	Kab.Gro b	2. Kegiatan patroli dan evakuasi sampah liar yang dilaksanakan	72	kali/ tahun	10.000.000
2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab.Gro b	1. Kelompok masyarakat yang terbina	5	kelompok	10.000.000
	Kab.Gro b	2. Kelompok masyarakat yang memperoleh bantuan	5	kelompok	10.000.000
2.11.11.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kab.Gro b	Rapat koordinasi prasarana dan sarana pengelolaan persampahan yang dilakukan		kali	
2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab.Gro b	Pengadaan bulldozer dan excavator	1	unit	521.930.138

	Kab.Gro b	Pengadaan incenerator dengan proses firolisis	0	unit	-
	Kab.Gro b	Pengadaan Kontainer sampah	1	unit	33.000.000
	Kab.Gro b	Pengadaan tempat sampah	20	unit	24.000.000
	Kab.Gro b	Pengadaan mesin pencacah sampah	0	unit	-
	Kab.Gro b	Pengadaan mesin pemilah sampah plastik	0	unit	-
	Kab.Gro b	Panjang pagar keliling TPA yang terbangun	100	m	110.000.000

	Kab.Gro b	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung operasional IPAL	-	unit	-
	Kab.Gro b	Panjang saluran TPA yang direhabilitasi	0	m	-
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Kab.Gro b	Persentase pelaku usaha dan/atau kegiatan yang telah memenuhi rincian teknis pengelolaan limbah B3	62,50	%	72.540.000
2.11.05.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab.Gro b	Jumlah pelaku usaha/ dan atau kegiatan yang telah memenuhi rincian teknis pengelolaan limbah B3	125	pelaku usaha dan/ atau kegiatan	72.540.000
2.11.05.2.01.02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab.Gro b	Pelaku usaha dan/ atau kegiatan penghasil LB3 yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis TPS LB3	125	pelaku usaha dan/ atau kegiatan	72.540.000
	Kab.Gro b	Nilai SAKIP perangkat daerah	82	Nilai	

	Kab.Gro b	Nilai IKM	77,70 (B)	Nilai	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab.Gro b	Persentase Laporan keuangan sesuai Standart Akuntansi Publik	100	%	8.602.974.086
	Kab.Gro b	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang kinerja urusan pemerintah daerah meliputi administrasi keuangan, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang, pemeliharaan BMD	100	%	
	Kab.Gro b	Persentase pemenuhan dokumen area penilaian manajemen resiko	100	%	
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Gro b	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	100	%	8.000.000
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Gro b	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	4	dok	2.000.000

X.XX.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Gro b	Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	25	dok	2.000.000
X.XX.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab.Gro b	Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun		dok	
X.XX.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab.Gro b	Dokumen DPA-SKPD yang tersusun		dok	
X.XX.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab.Gro b	Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	12	dok	2.000.000
X.XX.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Gro b	Dokumen LKJIP yang tersusun	1	dok	2.000.000
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Gro b	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100	%	5.613.453.000

X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Gro b	Pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	14	bulan	5.609.453.000
X.XX.01.2.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Gro b	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	dokumen	2.000.000
X.XX.01.2.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab.Gro b	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD tersusun	24	dokumen	2.000.000
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Gro b	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	100	%	85.000.000
X.XX.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Gro b	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40	stel	25.000.000
X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Gro b	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10	orang	10.000.000

X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Gro b	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30	orang	50.000.000
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Gro b	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	735.000.000
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Gro b	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50	unit	20.000.000
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Gro b	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	20	unit	25.000.000
	Kab.Gro b	Pengadaan korden	0	m	-
	Kab.Gro b	Pengadaan peralatan makan minum	0	unit	-

X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Gro b	Tercukupinya kebutuhan makan dan minum untuk keperluan kantor	130	kali	200.000.000
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Gro b	Karcis retribusi persampahan yang tercetak	250	bendel	10.000.000
	Kab.Gro b	Spanduk yang tercetak	10	buah	10.000.000
X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Gro b	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	3	eksemplar	15.000.000
X.XX.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Kab.Gro b	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	7.000	buah	150.000.000
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Gro b	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah	350	kali	300.000.000

X.XX.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab.Gro b	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang dikelola	25	dokumen	5.000.000
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Gro b	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100	%	700.521.086
X.XX.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Gro b	Jumlah pengadaan kendaraan sampah roda 3	5	unit	136.521.086
	Kab.Gro b	Jumlah pengadaan dump truk	1	unit	500.000.000
	Kab.Gro b	Jumlah pengadaan amroll	0	unit	-
X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Kab.Gro b	Jumlah Mebel yang diadakan	5	unit	20.000.000

X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Gro b	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	2	unit	20.000.000
	Kab.Gro b	Pengadaan AC	1	unit	4.000.000
	Kab.Gro b	Pengadaan Laptop	1	unit	5.000.000
	Kab.Gro b	Pengadaan PC	1	unit	5.000.000
	Kab.Gro b	Pengadaan CCTV	1	unit	5.000.000
	Kab.Gro b	Pengadaan printer	2	unit	5.000.000

X.XX.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Gro b	Pembangunan gedung kantor atau bangunan lainnya	0	unit	
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Gro b	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	755.000.000
X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Gro b	Pemenuhan kebutuhan surat menyurat	12	bulan	5.000.000
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Gro b	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	200.000.000
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Gro b	Pemebuhan pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	bulan	550.000.000
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Gro b	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	%	710.000.000

X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Gro b	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	bulan	600.000.000
X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Gro b	Peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	10	unit	10.000.000
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Gro b	Gedung Kantor dan bangunan lainnya terehabilitasi/terpelihara	2	unit	100.000.000

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. TELAAH KEBIJAKAN NASIONAL

Penyusunan perencanaan Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada kebijakan Nasional maupun Propinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan di tingka Nasional maupun Propinsi. Berikut adalah hasil identifikasi kebijakan Nasional bidang lingkungan hidup

Tabel 3.1
Renstra kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tahun 2019-2024

Menteri	Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Target IKLH (Point)				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim		68,7	68,96	69,22	69,48	69,74

Direktorat Jenderal PPKL	No	Sasaran Program Ditjen PPKL	Indikator Kinerja Program	Target IKLH (Point)				
				2020	2021	2022	2023	2024
	1.	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	55,1	55,2	55,3	55,4	55,5
	2.	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	84,1	84,2	84,3	84,4	84,5

Direktorat Jenderal PPKL	3.	Meningkatnya Indeks Kualitas Air Laut	Indeks Kualitas Air Laut	58,5	59	59,5	60	60,5
	No	Sasaran Program Ditjen PPKL	Indikator Kinerja Program	Target IKLH (Point)				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut		Indeks Kualitas Lahan	61,6	62,5	63,5	64,5	65,5
	4.	Meningkatnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	61,9	62,9	63,9	64,9	65,9
	5.	Meningkatnya Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	65,8	66,3	66,8	67,3	67,8

Menteri	Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Target IKLH (Point)				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terselenggaranya tata Kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehuatan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing (SS-4)		77	79	81	83	85

Direktorat Jenderal PPKL	No	Sasaran Program Ditjen PPKL	Indikator Kinerja Program	Target IKLH (Point)				
				2020	2021	2022	2023	2024
	1.	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPKL	SAKIP Ditjen PPKL	79	80	81	82	83

B. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangan isu strategis yang dihadapi untuk periode tahun 2021-2026. Sementara itu yang dimaksud dengan sasaran adalah kondisi yang menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Adapun Tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kinerja pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) sesuai ketentuan
- 2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan pulik yang berkualitas

Sedangkan sasaran Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah
- 2. Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta pengawasan dan pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) sesuai ketentuan
- 3. Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GROBOGAN

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA
1	2	4	5	6	7	8		9	10
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	KAB. GROBOGAN	85,71	77.376.000	APBD		100	78.497.952
2.11.02.2.01	2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang ditetapkan dan dievaluasi	KAB. GROBOGAN	100	20.000.000	APBD		100	50.000.000

2.11.02.2.01	2.11.02.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH yang disusun dan ditetapkan	KAB. GROBOGAN	1	10.000.000	APBD		1	25.000.000
2.11.02.2.01	2.11.02.2.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen pengendalian pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota yang tersusun	KAB. GROBOGAN	1	10.000.000	APBD		1	25.000.000
2.11.02.2.02	2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota yang tersusun	KAB. GROBOGAN	100	57.376.000	APBD		100	28.497.952
2.11.02.2.02	2.11.02.2.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Dokumen KLHS RTRW yang tersusun	KAB. GROBOGAN	1	27.376.000	APBD		0	-

2.11.02.2.02	2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Dokumen KLHS RPJMD/ RPJPD yang tersusun	KAB. GROBOGAN	2	30.000.000	APBD		0	-
2.11.02.2.02	2.11.02.2.02.03 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Dokumen KLHS KRP yang Berpotensi menimbulkan dampak/ resiko lingkungan hidup yang tersusun	KAB. GROBOGAN	0	-	APBD		1	28.497.952
	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pemantauan kualitas air	KAB. GROBOGAN	100	2.385.826.525	APBD		100	2.420.421.010
		Cakupan pemantauan kualitas udara	KAB. GROBOGAN	100		APBD		100	

2.11.03.2.01	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Presentase kampung iklim yang terbentuk	KAB. GROBOGAN	90		APBD		100	1.275.421.010
					1.385.826.525				
2.11.03.2.01	2.11.03.2.01.01 koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air Udara dan laut	Koordinasi dan sinkronisasi adipura yang dilaksanakan	KAB. GROBOGAN	5		APBD		5	330.000.000
		Jumlah peserta lomba LBS	KAB. GROBOGAN	19		APBD		19	225.000.000
		Pembangunan IPAL tahu dan tempe	KAB. GROBOGAN	0		APBD		0	-
					-				
		Pengadaan Onlimo	KAB. GROBOGAN	1		APBD		1	270.421.010
					300.000.000				
2.11.03.2.01	2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kampung iklim yang terbentuk dan dibina	KAB. GROBOGAN	6		APBD		1	50.000.000
		Dokumen inventarisasi Gas Rumah Kaca yang tersusun	KAB. GROBOGAN	0		APBD		0	-
					-				

2.11.03.2.01	2.11.03.2.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium	KAB. GROBOGAN	1	335.826.525	APBD		1	400.000.000
2.11.03.2.02	2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang tersusun	KAB. GROBOGAN	2	300.000.000	APBD		2	370.000.000
2.11.03.2.02	2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	1. Dokumen IKPLHD yang disusun tiap tahun	KAB. GROBOGAN	1	100.000.000	APBD		1	125.000.000
		2. Dokumen IKLH yang disusun tiap tahun	KAB. GROBOGAN	1	100.000.000	APBD		1	125.000.000
		3. Jumlah lokasi pengujian air dan udara ambien	KAB. GROBOGAN	45	100.000.000	APBD		50	120.000.000

2.11.03.2.03	2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	KAB. GROBOGAN	1		APBD		1	775.000.000
					700.000.000				
2.11.03.2.03	2.11.03.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemaran	Aksi Program Prokasih yang dilaksanakan	KAB. GROBOGAN	2		APBD		2	175.000.000
					150.000.000				
2.11.03.2.03	2.11.03.2.03.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1. Kelompok yang menerima bantuan bibit	KAB. GROBOGAN	5		APBD		5	350.000.000
		2. Pengadaan pupuk dan bibit tanaman hias	KAB. GROBOGAN	0		APBD		0	-
					-				

		3. Rehabilitasi lahan dengan cara sipil teknis (sumur resapan, gully plug dan dam penahan) yang terbangun	KAB. GROBOGAN	200		APBD		250	250.000.000
					200.000.000				
		4. Dam penahan yang terbangun	KAB. GROBOGAN	2		APBD		2	120.000.000
					100.000.000				
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	KAB. GROBOGAN	75,00		APBD		75,00	98.122.440
					96.720.000				

2.11.06.2.01	2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin	Jumlah data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/ kota	KAB. GROBOGAN	100	96.720.000	APBD	100	98.122.440
2.11.06.2.01	2.11.06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Usaha dan/atau Kegiatan yang difasilitasi pemenuhan persetujuan lingkungan	KAB. GROBOGAN	50	50.000.000	APBD	50	50.000.000
		Usaha dan/atau Kegiatan yang difasilitasi pemenuhan persetujuan lingkungan	KAB. GROBOGAN	0	-	APBD	0	-

2.11.06.2.01	2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh persetujuan Lingkungan Hidup yang dievaluasi	KAB. GROBOGAN	50		APBD		50	22.000.000
					21.000.000				
2.11.06.2.01	2.11.06.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Usaha/kegiatan yang yang diawasi	KAB. GROBOGAN	10		APBD		10	26.122.440
					25.720.000				

	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase pembentukan kader lingkungan tingkat desa/ kelurahan yang terbentuk	KAB. GROBOGAN	45		APBD		50	24.530.610
		Persentase sekolah yang sudah melaksanakan PBLHS (Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah tingkat kabupaten	KAB. GROBOGAN	25	24.180.000	APBD		30	

2.11.08.2.01	2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan pembinaan Lingkungan Hidup	KAB. GROBOGAN	#VALUE!		APBD		79,31	24.530.610
			KAB. GROBOGAN	#DIV/0!	24.180.000	APBD		20,69	
2.11.08.2.01	2.11.08.2.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah anggota saka kalpataru yang dibina	KAB. GROBOGAN	10	5.000.000	APBD		10	5.000.000
		Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya di bidang Lingkungan Hidup	KAB. GROBOGAN	10	7.180.000	APBD		10	5.000.000

2.11.08.2.01	2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Pelaksanaan gerakan peduli lingkungan hidup (Gerakan PBLHS) yang dilakukan	KAB. GROBOGAN	10	5.000.000	APBD	10	7.530.610
2.11.08.2.01	2.11.08.2.01.03 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	pelaksanaan car free day	KAB. GROBOGAN	47	7.000.000	APBD	47	7.000.000
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten terbaik	KAB. GROBOGAN	9	53.196.000	APBD	9	53.967.342

2.11.09.2.01	2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diberikan kepada Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan	KAB. GROBOGAN	3	53.196.000	APBD		3	53.967.342
2.11.09.2.01	2.11.09.2.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan penilaian kinerja Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	KAB. GROBOGAN	20	53.196.000	APBD		25	53.967.342

	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / kota yang terselesaikan	KAB. GROBOGAN	100		APBD		100	39.248.976
					38.688.000				
2.11.10.2.01	2.11.10.2.01 Penyelesaiam Pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / kota	Persentase pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / kota yang terselesaikan	KAB. GROBOGAN	100		APBD		100	39.248.976
					38.688.000				

2.11.10.2.01	2.11.10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Layanan aduan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	KAB. GROBOGAN	1		APBD		1	10.000.000
					10.000.000				
2.11.10.2.01	2.11.10.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	KAB. GROBOGAN	10		APBD		10	29.248.976
					28.688.000				
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Presentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	KAB. GROBOGAN	9,72		APBD		9,94	2.420.421.010
					2.385.826.525				

2.11.04.2.01	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Ruang Terbuka Hijau (RTH) dikelola dengan baik	KAB. GROBOGAN	23	2.385.826.525	APBD		25	2.420.421.010
2.11.04.2.01	2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terkelolanya Hutan Kota Purwodadi	KAB. GROBOGAN	1	250.000.000	APBD		1	300.000.000
2.11.04.2.01	2.11.04.2.01.05 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Terpeliharanya Taman Kota	KAB. GROBOGAN	22	1.500.000.000	APBD		24	1.500.000.000
2.11.04.2.01	2.11.04.2.01.07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Sarana dan Prasarana Taman Kota yang ditingkatkan dan ditata	KAB. GROBOGAN	2	400.000.000	APBD		2	400.000.000
			KAB. GROBOGAN	0	-	APBD		0	-
			KAB. GROBOGAN	0	-	APBD		0	-
			KAB. GROBOGAN	1	235.826.525	APBD		0	-

			KAB. GROBOGAN	0	-	APBD		1	220.421.010
			KAB. GROBOGAN	0	-	APBD		0	-
		Persentase timbukan sampah yang tertangani	KAB. GROBOGAN	22,20		APBD		23,20	
		Persentase usaha/ kegiatan yang menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang tertangani sesuai ketentuan	KAB. GROBOGAN	50		APBD		75	
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah diperkotaan yang ditangani	KAB. GROBOGAN	73		APBD		75	7.140.994.625
					7.038.930.138				
2.11.11.2.01	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Volume pengurangan sampah	KAB. GROBOGAN	192		APBD		216	7.140.994.625
					7.038.930.138				

2.11.11.2.01	2.11.11.2.01.01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	1. Dokumen kebijakan dan strategi daerah (jakstrada) persampahan yang tersusun	KAB. GROBOGAN	0	-	APBD	1	50.000.000
		2. Dokumen naskah akademik dan review Perda Persampahan yang tersusun	KAB. GROBOGAN	1	50.000.000	APBD	0	-
		3. Dokumen FS/ DED TPA Sampah yang tersusun	KAB. GROBOGAN	0	-	APBD	0	-
		4. Perbup pengelolaan sampah yang tersusun	KAB. GROBOGAN	0	-	APBD	0	-

2.11.11.2.01	2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaurn Ulang dan Pemanfaatan Kembali	KSM/ Bank Sampah yang terbantu dan terbina	KAB. GROBOGAN	6	10.000.000	APBD		12	20.000.000
		Pengadaan peralatan operasional KSM/ Bank Sampah	KAB. GROBOGAN	5	10.000.000	APBD		10	30.000.000
2.11.11.2.01	2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/Kota	1. Volume ampah yang tertangani di TPA	KAB. GROBOGAN	80	6.250.000.000	APBD		80	6.250.000.000
		2. Kegiatan patroli dan evakuasi sampah liar yang dilaksanakan	KAB. GROBOGAN	72	10.000.000	APBD		72	20.000.000
2.11.11.2.01	2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	1. Kelompok masyarakat yang terbina	KAB. GROBOGAN	5	10.000.000	APBD		15	20.000.000

		2. Kelompok masyarakat yang memperoleh bantuan	KAB. GROBOGAN	5		APBD		15	20.000.000
					10.000.000				
2.11.11.2.01	2.11.11.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Rapat koordinasi prasarana dan sarana pengelolaan persampahan yang dilakukan	KAB. GROBOGAN			APBD			
2.11.11.2.01	2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Pengadaan bulldozer dan excavator	KAB. GROBOGAN	1		APBD			
					521.930.138				
		Pengadaan incenerator dengan proses firolisis	KAB. GROBOGAN	0		APBD		1	200.000.000
		Pengadaan Kontainer sampah	KAB. GROBOGAN	1		APBD		2	68.000.000
					33.000.000				

		Pengadaan tempat sampah	KAB. GROBOGAN	20	24.000.000	APBD		100	120.000.000
		Pengadaan mesin pencacah sampah	KAB. GROBOGAN	0	-	APBD		5	162.994.625
		Pengadaan mesin pemilah sampah plastik	KAB. GROBOGAN	0	-	APBD		1	60.000.000
		Panjang pagar keliling TPA yang terbangun	KAB. GROBOGAN	100	110.000.000	APBD		100	120.000.000
		Pengadaan sarana dan prasarana pendukung operasional IPAL	KAB. GROBOGAN	-	-	APBD		-	-
		Panjang saluran TPA yang direhabilitasi	KAB. GROBOGAN	0	-	APBD		0	-

	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pelaku usaha dan/atau kegiatan yang telah memenuhi rincian teknis pengelolaan limbah B3	KAB. GROBOGAN	62,50		APBD		75,00	73.591.830
					72.540.000				
2.11.05.2.01	2.11.05.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelaku usaha/ dan atau kegiatan yang telah memenuhi rincian teknis pengelolaan limbah B3	KAB. GROBOGAN	125		APBD		150	73.591.830
					72.540.000				

2.11.05.2.01	2.11.05.2.01.02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Pelaku usaha dan/ atau kegiatan penghasil LB3 yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis TPS LB3	KAB. GROBOGAN	125	72.540.000	APBD	150	73.591.830
		Nilai SAKIP perangkat daerah	KAB. GROBOGAN	82		APBD	83	
		Nilai IKM	KAB. GROBOGAN	77,70 (B)		APBD	78,20 (B)	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Laporan keuangan sesuai Standart Akuntansi Publik	KAB. GROBOGAN	100	8.602.974.086	APBD	100	8.727.717.211

		Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang kinerja urusan pemerintah daerah meliputi administrasi keuangan, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang, pemeliharaan BMD	KAB. GROBOGAN	100		APBD		100	
		Persentase pemenuhan dokumen area penilaian manajemen resiko	KAB. GROBOGAN	100		APBD		100	

X.XX.01.2.01	X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	KAB. GROBOGAN	100		APBD		100	8.000.000
					8.000.000				
X.XX.01.2.01	X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	KAB. GROBOGAN	4		APBD		4	2.000.000
					2.000.000				
X.XX.01.2.01	X.XX.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	KAB. GROBOGAN	25		APBD		25	2.000.000
					2.000.000				
X.XX.01.2.01	X.XX.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	KAB. GROBOGAN			APBD			

X.XX.01.2.01	X.XX.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	KAB. GROBOGAN			APBD			
X.XX.01.2.01	X.XX.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	KAB. GROBOGAN	12	2.000.000	APBD		12	2.000.000
X.XX.01.2.01	X.XX.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LKJIP yang tersusun	KAB. GROBOGAN	1	2.000.000	APBD		1	2.000.000

X.XX.01.2.02	X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	KAB. GROBOGAN	100		APBD		100	5.613.453.000
					5.613.453.000				
X.XX.01.2.02	X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	KAB. GROBOGAN	14		APBD		14	5.609.453.000
					5.609.453.000				
X.XX.01.2.05	X.XX.01.2.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KAB. GROBOGAN	5		APBD		5	2.000.000
					2.000.000				
X.XX.01.2.07	X.XX.01.2.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD tersusun	KAB. GROBOGAN	24		APBD		24	2.000.000
					2.000.000				

X.XX.01.2.05	X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	KAB. GROBOGAN	100	85.000.000	APBD		100	125.264.211
X.XX.01.2.05	X.XX.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	KAB. GROBOGAN	40	25.000.000	APBD		40	25.000.000
X.XX.01.2.05	X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	KAB. GROBOGAN	10	10.000.000	APBD		10	50.264.211
X.XX.01.2.05	X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	KAB. GROBOGAN	30	50.000.000	APBD		30	50.000.000

X.XX.01.2.06	X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	KAB. GROBOGAN	100	735.000.000	APBD		100	835.000.000
X.XX.01.2.06	X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	KAB. GROBOGAN	50	20.000.000	APBD		50	20.000.000
X.XX.01.2.06	X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlatan dan perlengkapan kantor	KAB. GROBOGAN	20	25.000.000	APBD		20	25.000.000
		Pengadaan korden	KAB. GROBOGAN	0	-	APBD		0	-
		Pengadaan peralatan makan minum	KAB. GROBOGAN	0	-	APBD		0	-
X.XX.01.2.06	X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tercukupinya kebutuhan makan dan minum untuk keperluan kantor	KAB. GROBOGAN	130	200.000.000	APBD		130	200.000.000

X.XX.01.2.06	X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Karcis retribusi persampahan yang tercetak	KAB. GROBOGAN	250	10.000.000	APBD	250	10.000.000
		Spanduk yang tercetak	KAB. GROBOGAN	10	10.000.000	APBD	10	10.000.000
X.XX.01.2.06	X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	KAB. GROBOGAN	3	15.000.000	APBD	3	15.000.000
X.XX.01.2.06	X.XX.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	KAB. GROBOGAN	7.000	150.000.000	APBD	7.000	150.000.000
X.XX.01.2.06	X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah	KAB. GROBOGAN	350	300.000.000	APBD	350	400.000.000
X.XX.01.2.06	X.XX.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang dikelola	KAB. GROBOGAN	25	5.000.000	APBD	25	5.000.000

X.XX.01.2.07	X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	KAB. GROBOGAN	100		APBD		100	685.000.000
					700.521.086				
X.XX.01.2.07	X.XX.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan sampah roda 3	KAB. GROBOGAN	5		APBD		5	150.000.000
					136.521.086				
		Jumlah pengadaan dump truk	KAB. GROBOGAN	1		APBD		1	500.000.000
					500.000.000				
		Jumlah pengadaan amroll	KAB. GROBOGAN	0		APBD			-
					-				
X.XX.01.2.07	X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	KAB. GROBOGAN	5		APBD			
					20.000.000				
X.XX.01.2.07	X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	KAB. GROBOGAN	2		APBD		2	20.000.000
					20.000.000				

		Pengadaan AC	KAB. GROBOGAN	1	4.000.000	APBD			
		Pengadaan Laptop	KAB. GROBOGAN	1	5.000.000	APBD		1	10.000.000
		Pengadaan PC	KAB. GROBOGAN	1	5.000.000	APBD			
		Pengadaan CCTV	KAB. GROBOGAN	1	5.000.000	APBD			
		Pengadaan printer	KAB. GROBOGAN	2	5.000.000	APBD		2	5.000.000
X.XX.01.2.07	X.XX.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan gedung kantor atau bangunan lainnya	KAB. GROBOGAN	0	-	APBD		0	-
X.XX.01.2.08	X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KAB. GROBOGAN	100	755.000.000	APBD		100	755.000.000
X.XX.01.2.08	X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemenuhan kebutuhan surat menyurat	KAB. GROBOGAN	12	5.000.000	APBD		12	5.000.000

X.XX.01.2.08	X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KAB. GROBOGAN	12	200.000.000	APBD	12	200.000.000
X.XX.01.2.08	X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemebuhan pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	KAB. GROBOGAN	12	550.000.000	APBD	12	550.000.000
X.XX.01.2.09	X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	KAB. GROBOGAN	100	710.000.000	APBD	100	710.000.000

X.XX.01.2.09	X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KAB. GROBOGAN	12	600.000.000	APBD	12	600.000.000
X.XX.01.2.09	X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	KAB. GROBOGAN	10	10.000.000	APBD	10	10.000.000
X.XX.01.2.09	X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan bangunan lainnya terehabilitasi/terpelihara	KAB. GROBOGAN	2	100.000.000	APBD	2	100.000.000

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam mencapai tujuan dan sasarannya DLH pada TA 2024 akan melaksanakan program-program dan kegiatan- kegiatan sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
 - b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - b. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - c. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin
4. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyelesaian Pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / kota
7. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
8. Program Pengelolaan Persampahan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan Sampah
9. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah
 - a. Penyimpanan Sementara Limbah B3

10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2024 merupakan Dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup yang memuat tentang program dan kegiatan selama periode 1(satu) tahun dalam rangka mewujudkan visi misi Kabupaten Grobogan . Renja DLH ini disusun untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan Fungsi DLH Kabupaten Grobogan sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran. Penyusunan Renja dilakukan dengan pendekatan partisipatif, *Top-down* dan *Bottom-Up* .

Pada tahun 2024 arah kebijakan dalam penyusunan Renja difokuskan untuk mengatasi isu-isu utama yaitu dengan mengoptimalkan pengelolaan persampahan, mengoptimalkan capaian IKLH, mengoptimalkan pengurangan sampah di perkotaan, mengoptimalkan pengangkutan sampah dengan menambah armada, mengoptimalkan pencegahan udara, serta mengoptimalkan pengawasan terhadap AMDAL. Untuk itu diperlukan kerjasama serta partisipasi bagi segala pihak baik masyarakat, pemerintah terkait serta para pemaku kepentingan.

Purwodadi, 24 Maret 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GROBOGAN



NUGROHO AGUS PRARTOWO, SH. MH

Pembina Utama Muda
NIP. 19630805 198709 1 001